LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BANK RIAU KEPRI

TAHUN 2016



PENDAHULUAN

Bank Riau Kepri memandang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan merupakan hal penting dalam menjaga kelangsungan usaha yang sehat dan dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para pemegang saham (*shareholders*) serta memelihara dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kepercayaan *stakeholders* sebagai pemangku kepentingan, merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank. Kredibilitas Bank dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank.

Bank Riau Kepri memiliki pedoman GCG yang dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai kesinambungan usaha yang memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman GCG Bank Riau Kepri disusun berdasarkan pada prinsip- prinsip:

Transparansi : Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Akuntabilitas : Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi. Bank Riau Kepri sebagai perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

Responsibilitas : Bank Riau Kepri berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.

Independensi : Organ-organ perusahaan Bank Riau Kepri menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank Riau Kepri berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Fairness : Bank Riau Kepri senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi. Bank Riau Kepri juga selalu memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.

KEBIJAKAN, PROGRAM, MEKANISME GCG DAN UNIT KERJA PENGELOLA GCG

KEBIJAKAN GCG

Sejalan dengan perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang mencabut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Bank telah melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan Bank Indonesia tersebut khususnya yang menyangkut dengan kebijakan GCG Bank, hal ini ditandai dengan telah diterbitkannya Keputusan Direksi Nomor 138/KEPDIR/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penerapan GCG, selain telah menerbitkan Kebijakan tentang *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan) sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 67/KEPDIR/2013 tanggal 31 Juli 2013, Bank pada tahun 2015 telah menerbitkan ketentuan mengenai Pedoman Kerja Direksi sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 58/KEPDIR/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

Pada tahun 2016, Kebijakan Direksi tersebut di atas diubah dan disesuaikan dengan memperhatikan ketentuan otoritas Bank terkini sebagaimana termuat di dalam SK Direksi No. 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Di dalam pedoman kerja Direksi diatur secara tegas mengenai fungsi, persyaratan, komposisi, tugas dan tanggung jawab Direksi, etika kerja dan jabatan, waktu kerja, hak dan kewenangan, pengaturan mengenai rapat Direksi serta komite-komite yang berada di bawah Direksi.

Sebelumnya pada tahun 2014 Bank juga telah menerbitkan ketentuan mengenai pedoman kerja Dewan Komisaris sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014.

Di dalam pedoman kerja Dewan Komisaris diatur secara tegas mengenai persyaratan, komposisi serta tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika jabatan, waktu kerja Dewan Komisaris, pengaturan mengenai rapat Dewan Komisaris dan organ-organ yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi tersebut akan dievaluasi secara berkala untuk menjamin kesesuaian terhadap perubahan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROGRAM PENGENALAN DAN PEMAHAMAN GCG

Dalam rangka pengenalan dan pemahaman GCG kepada pegawai di lingkungan Bank, Divisi Kepatuhan telah memberikan sosialisasi/pelatihan terkait Kebijakan *Good Corporate Governance,* Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct)* dan *Whistleblowing System* yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan adanya program pengenalan dan pemahaman GCG yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan tersebut diharapkan akan mampu membangun kesadaran tentang arti pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam setiap aktivitas operasional Bank.

UNIT KERJA PENGELOLA GCG

Saat ini Bank Riau Kepri telah menyempurnakan struktur dan tata kelola Bank sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usaha, sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Di dalam Keputusan Direksi tersebut ditetapkan bahwa Divisi Kepatuhan di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas sebagai pengelola GCG Bank. Salah satu bentuk pengelolaan GCG yang dilakukan adalah melaksanakan internalisasi pelaksanaan GCG, berupa pengenalan dan penerapan pelaksanaan GCG kepada seluruh pegawai Bank, melalui sosialisasi tentang GCG, Kode Etik Kepatuhan dan *Whistle Blowing System*.

Selain itu, setiap periode Semester Divisi Kepatuhan juga melakukan penilaian sendiri *(self assesment)* pelaksanaan GCG yang hasil penilaiannya disampaikan di dalam Laporan Tingkat Kesehatan Bank untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank akan melakukan penyempurnaan atas kebijakan Buku Pedoman Perusahaan tentang Tata Kelola yang Baik (GCG).

PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG BANK RIAU KEPRI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkenaan dengan bisnis dan operasional Perseroan termasuk jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, pembayaran dividen dan pembagian keuntungan, persetujuan tentang Laporan Tahunan, penunjukan auditor independen, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan pendelegasian wewenang kepada Direksi untuk menindaklanjuti pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan disetujui oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan usaha perusahaan. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan. Hal-hal yang dibicarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham dimuat di dalam Akta RUPS baik yang sifatnya Tahunan maupun Luar Biasa.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris bersama Direksi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS pada tahun 2016 terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank berakhir. Materi yang disampaikan di dalam RUPS Tahunan, meliputi antara lain :

1. Penyampaian laporan tahunan Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
2. Penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan.
4. Penetapan penggunaan laba, dalam hal Bank mempunyai saldo laba yang positif.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Untuk RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Bank guna membicarakan dan memutuskan mata acara rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Bank.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaran RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diatur di dalam Anggaran Dasar Bank Riau Kepri yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam anggaran dasar Bank diatur mengenai tata cara pemanggilan RUPS, antara lain sebagai berikut :

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Panggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan.

Untuk penyelenggaraan RUPS tahun 2016, Bank telah menyampaikan pemberitahuan dan undangan kepada pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :

PEMBERITAHUAN JADWAL DAN AGENDA RUPS		
Tanggal Pelaksanaan RUPS	**Tujuan Surat**	**Mata Acara RUPS**
28 Januari 2016	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau. • Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Penetapan Pengurus Perseroan. • Lain-lain dianggap perlu.
30 Mei 2016	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau. • Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 • Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015. • Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2016. • Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2016. • Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2016. • Tindak lanjut audit pihak eksternal. • Lain-lain dianggap perlu.
31 Mei 2016	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau.	• Persetujuan rencana tambahan Modal Disetor tahun 2016

	• Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Penetapan calon pengurus perseroan. • Lain-lain dianggap perlu.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Sepanjang Tahun 2016, Bank telah melaksanakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN		
Jadwal	**Tempat**	**Agenda Rapat**
30 Mei 2016	• Gubernur Riau. • Gubernur Kepulauan Riau. • Seluruh Bupati dan Walikota Provinsi Riau dan Kepri.	• Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 • Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015. • Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2016. • Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2016. • Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri Tahun 2016. • Tindak lanjut audit pihak eksternal. • Lain-lain dianggap perlu.

RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Bapak H.R. Mambang Mit. Penunjukan Komisaris Utama sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (6) dan (7) anggaran dasar Bank.

RUPS Tahunan Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Tahunan menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ekamasni, Bustaman & Rekan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya *(volledig acquit et de charge)* kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2. Menetapkan alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan tahun buku 2015 dengan komposisi sama dengan tahun buku 2014.
3. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi dan tantiem tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) yang telah menjadi biaya tahun buku 2015 dengan komposisi sama dengan tahun buku sebelumnya sesuai dengan tabel yang diusulkan.
4. Menyetujui penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2016 sebesar Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) dan telah dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2016 dengan komposisi proporsional dengan jumlah saham, yang pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.
5. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Riau Kepri tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.
6. Menyetujui penetapan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri tahun 2016 sesuai usulan Dewan Komisaris yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebesar Rp39.539.953.000,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan rincian yang disampaikan.

Seluruh agenda dan keputusan rapat RUPS Tahunan ini selanjutnya dituangkan di dalam Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH Nomor : 18 tanggal 30 Mei 2016 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Riau Kepri.

Selain menyelenggarakan RUPS Tahunan tahun 2016, Bank juga telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu sebagai berikut :

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA		
Jadwal	**Tempat**	**Agenda Rapat**
28 Januari 2016	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	• Penetapan Pengurus Perseroan. • Lain-lain dianggap perlu.
31 Mei 2016	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri	• Persetujuan rencana tambahan Modal Disetor tahun 2016 • Penetapan calon pengurus perseroan. • Lain-lain dianggap perlu.

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Komisaris Utama yaitu Bapak H.R. Mambang Mit. Penunjukan Komisaris Utama sebagai pemimpin rapat telah memperhatikan pasal 9 ayat (6) dan (7) anggaran dasar Bank, bahwa apabila Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS Luar Biasa dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.

RUPS Luar Biasa Bank dihadiri oleh pemegang saham/kuasanya, dan telah memenuhi syarat dan sah untuk mengambil keputusan.

Dari hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 28 Januari 2016 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya, sebagai berikut :

1. Menetapkan pengangkatan Saudara Denny Muliya Akbar sebagai Direktur Operasional Perseroan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ini.
2. Menyetujui dan menetapkan calon Komisaris Non Independen yang akan diajukan *Fit and Proper Test* ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengisi 2 (dua) jabatan Komisaris Independen yang lowong.
3. Menyetujui agar dimulai proses pemilihan 2 (dua) Direktur dan 1 (satu) anggota Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya.

Untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut, Bank telah menuangkan hasil RUPS Luar Biasa ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 16 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Fery Bakti, SH, Notaris di Kota Pekanbaru.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan/penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan yang termuat di dalam akta tersebut.

Di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, memuat hal-hal sebagai berikut :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RUPSLB	
No dan Tanggal Akta	Keputusan RUPSLB
Akta Nomor 16 Tanggal 23 Februari 2016	Menetapkan pengangkatan Saudara Denny Muliya Akbar sebagai Direktur Operasional Perseroan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ini. Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut : <u>Susunan Dewan Komisaris</u> Mambang Mit : Komisaris Utama Abdul Rivaie Rachman : Komisaris Independen Sarjono Amnan : Komisaris Independen <u>Susunan Direksi</u> Irvandi Gustari : Direktur Utama Denny Muliya Akbar : Direktur Operasional Nizam : Direktur Dana & Jasa Afrial Abdullah : Direktur Kredit & Syariah Eka Afriadi : Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut di atas telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasan pemberitahuan perubahan data perseroan, yaitu :

Nomor dan Tanggal Akta	Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan		
	Nomor Pemberitahuan	Tanggal Pemberitahuan	Perihal
Akta Nomor 16 Tanggal 23 Februari 2016	AHU-AH.01.03.0026165	24 Februari 2016	Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Sementara itu untuk hasil pembahasan terhadap agenda RUPS Luar Biasa tanggal 31 Mei 2016 menghasilkan berbagai keputusan-keputusan diantaranya sebagai berikut :

1. Menyetujui rencana tambahan modal disetor tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

NO	PEMEGANG SAHAM (PEMPROV/PEMKO/PEMKAB)	RENCANA TAMBAHAN MODAL DISETOR (Rp)
1	2	3
1	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	5,000,000,000
2	Pemerintah Kota Batam	50,000,000,000
	TOTAL	**55,000,000,000**

Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehingga untuk selanjutnya susunan para pemegang saham Perseroan yang tercatat adalah sebagai berikut :

NO	PEMEGANG SAHAM (PEMPROV/PEMKO/PEMKAB)	JUMLAH SAHAM (LEMBAR)	NILAI NOMINAL (Rp)
1	2		3
1	Pemerintah Provinsi Riau	4,191,682	419,168,200,000
2	Pemerintah Kota Pekanbaru	150,000	15,000,000,000
3	Pemerintah Kabupaten Kampar	1,051,812	105,181,200,000
4	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1,216,062	121,606,200,000
5	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	64,007	6,400,700,000
6	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	440,270	44,027,000,000
7	Pemerintah Kabupaten Siak	327,110	32,711,000,000
8	Pemerintah Kota Dumai	52,030	5,203,000,000
9	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	319,668	31,966,800,000
10	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	82,807	8,280,700,000
11	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	371,351	37,135,100,000
12	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	152,086	15,208,600,000
13	Pemerintah Kabupaten Bintan	380,789	38,078,900,000
14	Pemerintah Kota Batam	500,000	50,000,000,000
15	Pemerintah Kabupaten Karimun	71,900	7,190,000,000

16	Pemerintah Kabupaten Natuna	181,546	18,154,600,000
17	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	83,913	8,391,300,000
18	Pemerintah Kabupaten Lingga	60,000	6,000,000,000
19	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	600,000	50,000,000,000
20	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	120,000	12,000,000,000
21	Pemerintah Kabupaten Anambas	75,000	7,500,000,000
	TOTAL	**10,492,033**	**1,049,203,300,000**

2. Penetapan Calon Pengurus Bank.

Dari hasil pembahasan terkait pengurus Bank, maka RUPS sepakat memutuskan sebagai berikut :

a. Tidak memperpanjang masa jabatan Direksi dan Komisaris yang berakhir masa jabatannya sebagai berikut :

No	Nama Pengurus Bank	Jabatan	Masa Berakhir Jabatan
1.	Sarjono Amnan*	Komisaris Independen	31 Agustus 2016
2.	Afrial Abdullah*	Direktur Kredit & Syariah	13 September 2016
3.	Nizam	Direktur Dana & Jasa	31 Agustus 2016

* atas permohonan yang bersangkutan disetujui untuk mengundurkan diri.

b. Untuk mengisi 2 (dua) jabatan Komisaris yaitu 1 (satu) Komisaris Independen dan 1 (satu) Komisaris Non Independen maka diusulkan 2 (dua) calon Komisaris Independen dan 2 (dua) calon Komisaris Non Independen untuk diajukan *fit and profer test* ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu sebagai berikut :

Calon Komisaris Bank :

No	Nama Calon Komisaris	Jabatan Yang akan Diduduki
1. 2.	Taufiqurrahman R.M. Zubir Salehan	Komisaris Independen
1. 2.	Herman Abdullah Wan Marwan	Komisaris Non Independen

c. Mengulang pengumuman untuk jabatan Direksi di koran nasional yang dilakukan oleh Bank yang diberi waktu dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dari tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini.

d. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan verifikasi administrasi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya dikonsultasikan kepada tim yang mewakili pemegang saham untuk kemudian disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

e. Membentuk Tim Seleksi Direksi dari pemegang saham yaitu sebagai berikut :

- Gubernur Riau
- Bupati Meranti
- Bupati Indragiri Hilir
- Wali Kota Tanjung Pinang
- Bupati Karimun

DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa untuk susunan keanggotaan Dewan Komisaris ditetapkan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berdomisili di Pekanbaru sebagai kota kedudukan kantor pusat Bank Riau Kepri.

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, sepanjang tahun 2016 anggota Dewan Komisaris Bank yang tercatat di dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Mambang Mit	Komisaris Utama
A. Rivaie Rachman	Komisaris (independen)
Sarjono Amnan*	Komisaris (independen)

* ***Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per 31 Agustus 2016***

Kriteria Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*).

Untuk persyaratan anggota Dewan Komisaris Bank sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

A. Persyaratan Umum:

Orang perseorangan, Warga Negara Indonesia :

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
3) Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4) Sehat jasmani dan rohani.
5) Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
7) Tidak menjabat sebagai pengurus pada partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

B. Persyaratan Khusus

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi Persyaratan Khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam keputusan RUPS.

C. Persyaratan Lainnya

1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
2) Persyaratan lainnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia/OJK.
3) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota direksi.

Independensi Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan GCG, bahwa untuk pelaksanaan GCG Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur mengenai kriteria Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak

independen.

Sehubungan hal tersebut di atas seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di atas. Selain hal tersebut Komisaris Independen Bank telah membuat surat pernyataan bahwa tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Mambang Mit	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
A. Rivaie Rachman	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Sarjono Amnan	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pelaksanaan Tata Kelola, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :

a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

a. anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsi dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
c. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sesuai hal tersebut di atas, maka untuk jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN KOMISARIS			
Nama	**Jabatan di Bank Riau Kepri**	**Jabatan Pada Perusahaan/Instansi Lain**	**Nama Perusahaan/Instansi Lain**
Mambang Mit	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
A. Rivaie Rachman	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada
Sarjono Amnan	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada

Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Bank mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sepanjang tahun 2016, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain, dengan rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS					
Nama	**Kepemilikan Saham**				
	Bank Riau Kepri	**Bank Lain**	**Lembaga Keuangan Non Bank**	**Perusahaan Lain**	**Keterangan**
Mambang Mit	-	-	-	-	Nihil
A. Rivaie Rachman	-	-	-	-	Nihil
Sarjono Amnan	-	-	-	-	Nihil

Pemenuhan Ketentuan Fit & Proper Tes

Seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*). Dalam melaksanakan tugasnya selaku Komisaris Bank, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Persetujuan Bank Indonesia	Tanggal Persetujuan	Perihal
Mambang Mit	Surat OJK No. SR-24/KO.5411/2015	07 Mei 2015	Pengangkatan Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank Saudara.
A. Rivaie Rachman	Surat BI No. 8/144/GBI/DPIP/Rahasia	04 Desember 2006	Keputusan atas Pencalonan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau
	Surat BI No. 13/18/DPB1/APBU/Pbr	14 Maret 2011	Perpanjangan Masa Jabatan Komisaris Bank Saudara
	Surat OJK No. SR-22/KO.5411/2015	21 April 2015	Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sarjono Amnan*	Surat BI No. 14/44/DPB1/APBU/Pbr	25 September 2012	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara

Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang secara kolektif bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah setara.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan/ Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal Perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainya (KUD/Kebijakan Umum Direksi, *Corporate Plan, Business Plan*) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan PT. Bank Riau Kepri baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.

12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan *prudential banking practices*.
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi menerapkan secara efektivitas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance,* antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak, bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.
6. Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) orang diantara para anggota Dewan Komisaris sebagai Komisaris utusan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan administrasi umum untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris.

7. Dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite/unit kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, dan wewenang serta pemberhentian komite/unit kerja diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas beban Perseroan.

Kinerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris selalu berpedoman pada Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Tahunan, dan Program Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan prinsip Tata Kelola diterapkan dengan baik.

Dalam menjalankan program kerja dimaksud, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Program Kerja Dewan Komisaris selama tahun 2016 menghasilkan beberapa persetujuan, pendapat, tanggapan, dan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan perpanjangan masa kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Persetujuan penyempurnaan Rencana Bisnis Bank tahun 2016.
3. Persetujuan perubahan susunan keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
4. Persetujuan penggantian sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
5. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2016.
6. Persetujuan atas rangkap tugas dan tanggung jawab Direksi Bank.
7. Persetujuan kredit kepada Pihak Terkait an. PT. Ady Putra Prima Kencana.
8. Persetujuan kredit kepada pengurus Bank.
9. Persetujuan pinjaman Bank kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.
10. Persetujuan draft perubahan Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Direksi.
11. Persetujuan atas Kajian Berkala (*Periodical Review)* Kebijaksanaan Perkreditan Bank.
12. Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk audit Laporan Keuangan Bank tahun buku 2016.
13. Menyampaikan Laporan Evaluasi Kinerja Bank tahun 2015 kepada Pemegang Saham Pengendali Bank.
14. Menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

15. Menyampaikan Laporan Hasil *Review* SKAI tahun 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
16. Menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
17. Melakukan konsultasi mengenai peraturan dan ketentuan pencalonan pengurus Bank ke Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
18. Saran dan rekomendasi kepada Direksi dalam upaya perbaikan NPL Bank.
19. Tanggapan atas tindak lanjut temuan OJK tahun 2015.
20. Tanggapan dan masukan atas realisasi Rencana Bisnis Bank.
21. Tanggapan atas hasil pemeriksaan kinerja Bank oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau.
22. Tanggapan dan masukan atas Laporan Pelaksanaan Komitmen Pengembangan Bank.
23. Tanggapan atas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan.
24. Tanggapan dan masukan atas perkembangan kinerja Bank.
25. Tanggapan atas Laporan Hasil Audit Umum dan Audit Khusus pada beberapa jaringan kantor Bank.
26. Tanggapan atas Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
27. Tanggapan atas usulan pembentukan Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, ditegaskan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* Bank Rapat Internal Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 6 (enam) kali dalam setahun, dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan, dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan dihadiri oleh anggota Komisaris, atau dengan mengundang Direksi dan/atau pejabat Bank terkait.

Sepanjang tahun 2016 Dewan Komisaris Bank telah melaksanakan 18 (delapan belas) kali pertemuan/rapat, baik yang diselenggarakan oleh internal Komisaris maupun rapat dengan mengundang Direksi, atau pejabat/pegawai Bank lainnya, yang terlihat pada tabel berikut :

AKTIVITAS RAPAT DEWAN KOMISARIS			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	07 Januari 2016	Pembahasan Rekomendasi Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan
2	07 Januari 2016	Rapat Kerja Tahun 2016	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Seluruh Direksi Bank 5. Seluruh Pemimpin Divisi/*Desk* 6. Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/Kedai
3	11 Januari 2016	1. Kondisi Likuiditas PT. Bank Riau Kepri 2. Persiapan pindah Gedung Kantor PT. Bank Riau Kepri 3. Persiapan RUPSLB PT. Bank Riau Kepri 4. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Seluruh Direksi Bank 5. Pemimpin Divisi MSDM 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
4	26 Januari 2016	Pembahasan Persiapan dan Skenario Pra RUPSLB	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Seluruh Direksi Bank 5. Pemimpin Divisi Hukum 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
5	26 Februari 2016	Rapat Pembahasan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2018	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Seluruh Direksi Bank 5. Divisi Perencanaan Strategis
6	14 Maret 2016	Pembahasan Surat OJK Jakarta perihal Permohonan Persetujuan Pencalonan Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Riau Kepri	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan
7	23 Maret 2016	1. Pembahasan Progress Rencana *Spin Off* Bank Riau Kepri Syariah 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Direktur Kredit dan Syariah 5. Pemimpin Divisi Syariah 6. Staf Direksi
8	27 Maret 2016	Pembahasan Laporan Penggunaan Dana PT. Bank Riau Kepri	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman

			3. Sarjono Amnan 4. Seluruh Direksi Bank
9	31 Maret 2016	Pembahasan Penanganan Permasalahan NPL PT. Bank Riau Kepri	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Direktur Kredit dan Syariah 5. Direktur Operasional 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pinbag Divisi PKB
10	09 Juni 2016	Tindak Lanjut Hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB PT. Bank Riau Kepri	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Seluruh Direksi Bank
11	29 Juni 2016	Rapat Pembahasan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2016	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Seluruh Direksi Bank 5. Divisi Perencanaan Strategis
12	21 Juli 2016	Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2016	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Sarjono Amnan 4. Seluruh Direksi Bank 5. Seluruh Pemimpin Divisi/*Desk* 6. Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/Kedai
13	16 Agustus 2016	Persetujuan Berkala (*Periodical Review)* Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB)	1. H.R. Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Seluruh Direksi Bank 4. Divisi Komersial
14	14 September 2016	Rapat Pembahasan Surat Direksi perihal Permohonan Permintaan Keputusan Dewan Komisaris Atas Rangkap Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman
15	27 September 2016	Rapat Pembahasan Surat Direksi perihal Permohonan Persetujuan Kredit kepada Pengurus Bank	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman
16	26 Oktober 2016	1. Tindak Lanjut Temuan OJK dan BPK 2. Perkembangan Calon Dewan Komisaris dan Direksi Bank	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Direktur Utama 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin SKAI 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi MSDM
17	25 November 2016	Pembahasan Rencana Bisinis Bank tahun 2017	1. H.R. Mambang Mit 2. Direktur Utama 3. Pemimpin Divisi

			Perencanaan Strategis 4. Pemimpin Divisi MSDM 5. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa
18	20 Desember 2016	1. Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Buku 2016 2. Penyampaian Keputusan Rakerwil FKDK/P BPDSI Wilayah Barat	1. H.R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Direksi Bank 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi *Treasury* & Internasional

Rapat di atas merupakan rapat Dewan Komisaris yang berdasarkan anggaran dasar Bank telah memenuhi kuorum, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang mengikat.

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk jika terdapat adanya *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan para peserta rapat, selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

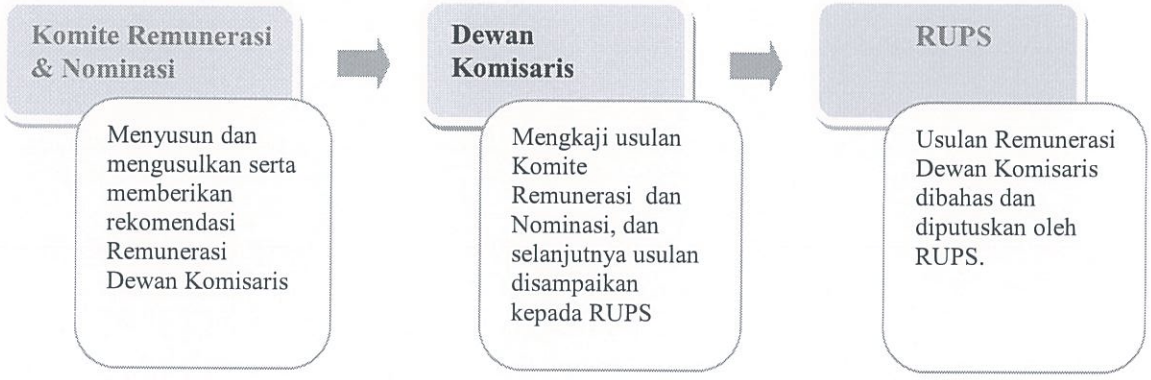
Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris secara fisik dalam rapat Dewan Komisaris baik yang diselenggarakan internal Dewan Komisaris maupun mengundang Direksi dan pejabat Bank Riau Kepri lainnya, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

Nama	**Jumlah Kehadiran (Total 18 kali Rapat)**			**% Kehadiran**
	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi/Divisi	**Rapat Internal Dewan Komisaris**	**Total Jumlah Kehadiran Rapat Dewan Komisaris**	
Mambang Mit	14	4	18	100%
A. Rivaie Rachman	12	4	16	89%
Sarjono Amnan	2	11	13	100%

Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Bank didasarkan pada Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, Anggaran Dasar Bank, dan Keputusan Direksi Nomor 64/KEPDIR/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Keputusan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS, dengan mekanisme sebagai berikut :



Remunerasi dan Fasilitas lain Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Dewan Komisaris adalah sebesar Rp9.044.093.546,-.

Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2016 terlihat dalam tabel berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	4*	8.771.229.798,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	272.863.748,-
Jumlah Penerimaan		**9.044.093.546,-**

Keterangan :

* Sepanjang tahun 2016 jumlah Komisaris Bank adalah tiga orang, namun untuk pembayaran tantiem tahun 2016 selain dibayarkan kepada tiga orang Komisaris Bank, juga dibayarkan kepada seorang Komisaris Independen (Chairisman Rasahan) yang masa jabatannya berakhir per April 2015.

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2016 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah :

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	3
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	1*
Total	**4****

Keterangan :

* Untuk kelompok nominal remunerasi Rp 500 juta ke bawah adalah Komisaris Independen (Chairisman Rasahan) yang masa jabatannya berakhir per April 2015.

** Jumlah Komisaris Bank adalah tiga orang, namun untuk pembayaran tantiem tahun 2016 selain dibayarkan kepada tiga orang Komisaris Bank yang masih menjabat juga dibayarkan kepada seorang Komisaris Independen (Chairisman Rasahan) yang masa jabatannya berakhir per April 2015.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Dengan latar belakang Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Dewan Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Prosedur Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program Orientasi mengenai Bank wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat.
2. Tanggung jawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk.
3. Materi yang diberikan pada Program Orientasi antara lain meliputi :
   a. Gambaran mengenai Bank yang berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
   b. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Bank.
   c. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
   d. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
   e. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

f. Sebagai *team building,* yaitu bahwa seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dewan Komisaris.

Program Pelatihan dan Seminar Dewan Komisaris

Pada tahun 2016 Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/*workshop* baik yang diselenggarakan oleh pihak internal, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia.

Nama	Jenis Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Tgl & Tahun Pelaksanaan
Mambang Mit (Komisaris Utama)	Seminar Meningkatkan Daya Saing Perbankan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	LPPI	12-05-2016
	High Level Seminar dan *Workshop* Tranformasi BPD	Asbanda	23-05-2016
	Seminar Internasional OJK *Empowering MSMEs Through Financial Literacy And Inclusion*	OJK	01-06-2016
	Workshop Peranan Obligasi sebagai Penguatan Pembiayaan Jangka Panjang dan IPO untuk Peningkatan Daya Saing sebagai "*Corporate Action*" dalam Era Globalisasi	Divisi Treasury & Internasional	24-06-2016
	Seminar Pengelolaan SDM Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Penanganan Hubungan Industrial Dalam konteks GCG Serta *Workshop* Pengelolaan Kredit Bermasalah Tinjauan Pengelolaan Bank dan Hukum	Divisi MSDM	20-07-2016
	Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah	BPK RI	22-08-2016
	Workshop Managing Anti Money Laundering : Implications of Tax Amnesty Policy in Banking Sector	Infobank	25-08-2016
	Workshop Risk Based Bank Rating (RBBR) Kepada Bank Pembangunan Daerah	OJK	01-09-2016

	Seminar Nasional BPDSI *Tax Amnesty*, Sebuah Tantangan sekaligus Peluang bagi BPDSI	Asbanda	03-09-2016
	Seminar nasional pelaksanaan GCG, Pemahaman tindak pidana perbankan dan kepatuhan terhadap kerahasiaan dokumen perusahaan	Divisi MSDM & Divisi Hukum	07-10-2016
	Seminar FKDKP untuk Level Pengurus Bank	FKDKP	03-11-2016
A. Rivaie Rachman (Komisaris Independen)	Seminar Manajemen Risiko (Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko)	BSMR	27-05-2016
	Seminar FKDKP untuk Level Pengurus Bank	FKDKP	03-11-2016
Sarjono Amnan (Komisaris Independen)	*Workshop* Strategi Bersaing di Tengah Turbulensi	Divisi MSDM	12-02-2016
	Workshop Restrukturisasi dan Penyelematan Kredit Yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank	BSMR	10-04-2016
	Seminar Pengelolaan SDM Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Penanganan Hubungan Industrial Dalam konteks GCG Serta *Workshop* Pengelolaan Kredit Bermasalah Tinjauan Pengelolaan Bank dan Hukum	Divisi MSDM	20-07-2016
	Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Daerah	BPK RI	22-08-2016
	Workshop Managing Anti Money Laundering : Implications of Tax Amnesty Policy in Banking Sector	Infobank	25-08-2016

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris selain berpedoman pada anggaran dasar Bank dan BPP GCG Bank, juga mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Dewan Komisaris berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dengan organ kelengkapannya, dan dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Bank.

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEPDKS/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
   a. Dasar Hukum
   b. Defenisi dan istilah yang digunakan
2. Komisaris, meliputi :
   a. Visi, Misi dan Tujuan
   b. Fungsi
   c. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
   d. Etika Jabatan
   e. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
   f. Waktu kerja
   g. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris berkaitan dengan Anggaran Dasar
   h. Rapat Dewan Komisaris
   i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
   j. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
3. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris
   a. Staf Ahli dan Komite-Komite
   b. Sekretariat Dewan Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Penentuan Komisaris Independen Bank dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk

bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

j. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal :

   1) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
   2) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Direksi

Kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank pada prinsipnya diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Bank dan Peraturan Bank Indonesia. Pada Bank Riau Kepri, kriteria atau persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi telah diatur di dalam SK Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016

tentang Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang telah diselaraskan dengan anggaran dasar Bank dan ketentuan pihak regulator.

Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus serta persyaratan lainnya dan beberapa syarat tambahan bagi Direktur Kepatuhan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia terkait Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut :

KRITERIA/PERSYARATAN DIREKSI					
Kriteria/Persyaratan	**Direktur Utama**	**Direktur Dana & Jasa**	**Direktur Kredit & Syariah**	**Direktur Operasional**	**Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko**
Persyaratan Umum :					
Warga Negara Indonesia.	√	√	√	√	√
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.	√	√	√	√	√
Mempunyai Akhlak dan Moral yang Baik.	√	√	√	√	√
Setia dan taat kepada NKRI.	√	√	√	√	√
Sehat jasmani dan rohani.	√	√	√	√	√
Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus Bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.	√	√	√	√	√
Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara dan perbuatan tercela dibidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.	√	√	√	√	√
Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan	√	√	√	√	√
Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.	√	√	√	√	√
Persyaratan Khusus :					
Memiliki kompetensi, integritas dan reputasi/kelayakan keuangan yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).	√	√	√	√	√
Persyaratan Lainnya :					
Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham	√				

pengendali.					
Memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif pada Bank.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.	√	√	√	√	√
Sesama anggota Direksi dan antara Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.	√	√	√	√	√
Bagi calon Direksi yang berasal dari internal Bank minimal pernah menjadi pejabat eksekutif satu level dibawah Direksi atau sedang menjabat sebagai Pemimpin Divisi	√	√	√	√	√
Bagi calon Direksi dari eksternal Bank pernah menjadi pejabat eksekutif yang jabatannya satu level di bawah Direksi pada Bank Umum dan berpengalaman operasional memimpin Cabang Bank Umum sebelum menjadi Pejabat Eksekutif satu level di bawah Direksi serta memilki rekomendasi atau Surat Keterangan dari tempat bekerja sebelumnya	√	√	√	√	√
Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	√	√	√	√
Dilarang :					
Merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.	√	√	√	√	√
Merangkap jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat/daerah.	√	√	√	√	√
Merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan atau pertentangan kepentingan secara langsung/tidak langsung dengan perseroan yang dipimpinnya dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√	√	√	√	√
Persyaratan Tambahan Untuk Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko					
Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama Bank dan/atau Wakil Direktur Utama					√
Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan					√

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
Memenuhi persyaratan independensi					√
Lulus *Fit and proper test*					√

Komposisi Direksi

Pengangkatan anggota Direksi Bank dilakukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sepanjang tahun 2016, susunan pengurus Bank (Direksi) adalah sebagai berikut :

Nama Direksi	Jabatan	Periode Jabatan	
		Diangkat	Berakhir
Irvandi Gustari	Direktur Utama	2015	2019
Denny Muliya Akbar*	Direktur Operasional	2016	2020
Nizam**	Direktur Dana dan Jasa	2012	2016
Afrial Abdullah***	Direktur Kredit dan Syariah	2012	2016
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	2013	2017

* *Menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Februari 2016*
** *Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Dana dan Jasa per 31 Agustus 2016*
*** *Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kredit dan Syariah per 13 September 2016*

Uji Kelayakan Dan Kepatutan Direksi

Setiap anggota Direksi Bank memiliki pengalaman dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank, hal ini mengingat karena anggota Direksi Bank merupakan mantan dan pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif Bank. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan memenuhi persyaratan Bank Indonesia melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and profer test)* Direksi.

Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus uji kelayakan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, sebagaimana terungkap pada tabel di bawah ini :

PERSETUJUAN PENGANGKATAN DIREKSI BANK			
Nama Direksi	**Jabatan**	**Persetujuan Bank Indonesia**	
		Nomor Surat	**Tanggal**
Irvandi Gustari	Direktur Utama	SR-24/KO.5411/2015	07 Mei 2015
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	SR-36/KO.54/2016	23 Februari 2016
Nizam	Direktur Dana dan Jasa	14/44/DPB1/APBU/Pbr	25 September 2012
Afrial Abdullah	Direktur Kredit dan Syariah	14/44/DPB1/APBU/Pbr	25 September 2012
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	15/2/DPKP/Pbr	12 Juli 2013

Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Di samping hal tersebut Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Untuk memaksimalkan kinerja Direksi dalam rangka pengurusan Bank, diaturlah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang tertuang di dalam surat Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi. Pedoman Kerja Direksi ini disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perbankan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, keputusan-keputusan RUPS, dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (*fairness*).

Sebagai bagian implementasi pelaksanaan tata kelola yang baik, Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi yang di dalamnya mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi Bank telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang di dalam Surat Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 143/DK-BRK/2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerja Direksi.

Tugas dan Tanggung jawab Masing-masing Direksi

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi Bank diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi, yaitu sebagai berikut :

1. **Tugas Direktur Utama**
   a. Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.
   b. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham.
   c. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
   d. Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya.
   e. Bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

f. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakanBank.

g. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal.

h. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh.

i. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank.

j. Menyiapkan Rencana Kerja Bank.

k. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank ditutup.

l. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur.

m. Direktur Utama berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

n. Direktur Utama berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank.

2. Tugas Direktur Dana & Jasa

a. Direktur Dana & Jasa dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Dana & Jasa bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Dana & Jasa menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

3. Tugas Direktur Kredit & Syariah

a. Direktur Kredit & Syariah dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Kredit & Syariah bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Kredit & Syariah menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

4. Tugas Direktur Operasional

a. Direktur Operasional dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Operasional bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Operasional menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

5. Tugas Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

a. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

b. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya.

c. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.

d. Di samping melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, antara lain yaitu :

- Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank;
- Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktur lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya;
- Memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkat organisasi.
- Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
- Melaporkan kepada pihak otoritas perbankan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan.

Independensi Direksi

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Irvandi Gustari	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Denny Muliya Akbar	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Nizam	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Afrial Abdullah	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√
Eka Afriadi	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√	x	√

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Jabatan rangkap Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

RANGKAP JABATAN PADA DIREKSI			
Nama Direksi	**Jabatan**	**Pada Bank Lain**	**Perusahaan Lain**
Irvandi Gustari	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada
Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada
Nizam	Direktur Dana & Jasa	Tidak ada	Tidak ada
Afrial Abdullah	Direktur Kredit & Syariah	Tidak ada	Tidak ada
Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada	Tidak ada

Kepemilikan Saham Direksi

Bank mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank Riau Kepri maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Untuk periode 31 Desember 2016, seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank maupun Perusahaan lain.

Rincian Kepemilikan Saham Direksi Bank adalah sebagai berikut :

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI					
Nama	Kepemilikan Saham				
	Bank Riau Kepri	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain	Keterangan
Irvandi Gustari	-	-	-	-	Nihil
Denny Muliya Akbar	-	-	-	-	Nihil
Nizam	-	-	-	-	Nihil
Afrial Abdullah	-	-	-	-	Nihil
Eka Afriadi	-	-	-	-	Nihil

Rapat Direksi

Di dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* Bank Riau Kepri dan Pedoman Kerja Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu dan diselenggarakan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) bulan.

Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal tersebut di atas berdasarkan permintaan tertulis :

1. Seorang atau lebih Direktur.
2. Permintaan tertulis seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris.
3. Permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2016 Direksi Bank telah menyelenggarakan rapat sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kali, baik rapat internal Direksi, rapat Direksi dengan Komisaris maupun rapat Direksi dengan unit kerja terkait (rapat koordinasi). Rapat Direksi berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis.

AKTIVITAS RAPAT DIREKSI			
No	Tanggal	Materi Rapat	Peserta
1	04 Januari 2016	Rapat Pembahasan Progress Kinerja *Desk Service Quality* tahun 2015 dan Program Kerja tahun 2016	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Divisi Treasury & Internasional 4. Anggota ALCO Bank
2	04 Januari 2016	Rapat Likuiditas Awal Tahun 2016	1. Nizam 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 4. Pemimpin Divisi Produk dan Jasa 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan

			6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
3	05 Januari 2016	Rapat Pembahasan *Replenishment* Kas ATM oleh Pihak Ketiga	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional 6. Pemimpin Divisi MSDM 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
4	07 Januari 2016	Rapat Likuiditas tahun 2016	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Nizam 4. Afrial Abdullah 5. Pemimpin Divisi MSDM 6. Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa 7. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 9. Pemimpin Cabang
5	13 Januari 2016	Rapat Koordinasi Peresmian Kantor Gedung Bank Riau Kepri	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi MSDM 4. Pemimpin Divisi Umum
6	25 Januari 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Januari 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Januari 2016 3. Membahas dampak dari Permenkeu No. 235/PMK.07/2015 terhadap DPK Pemda	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Divisi Treasury & Internasional 4. Anggota ALCO Bank
7	25 Januari 2016	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2015	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Nizam 4. Eka Afriadi 5. Anggota Komite Manajemen Risiko
8	01 Februari 2016	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kredit NPL	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro 7. Pemimpin Divisi Komersial 8. Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 10. Pemimpin Divisi PKB
9	02 Februari 2016	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kredit NPL	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 7. Pemimpin Divisi

			Komersial 8. Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 10. Pemimpin Divisi PKB
10	05 Februari 2016	Pembahasan Kredit Macet Capem Dalu-Dalu	1. Denny M. Akbar 2. Afrial Abdullah 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 5. Pemimpin Divisi Hukum
11	09 Februari 2016	Penanganan Kredit NPL Capem Sorek	1. Denny M. Akbar 2. Afrial Abdullah 3. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 4. Divisi PKB
12	10 Februari 2016	Perkembangan Bisnis Bank	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Seluruh Pemimpin Divisi & Desk
13	11 Februari 2016	Pembahasan Kredit Macet Capem Sorek	1. Denny M. Akbar 2. Afrial Abdullah 3. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 4. Pemimpin Divisi Hukum 5. Unit Kerja Terkait
14	15 Februari 2016	Rapat Pembahasan Kredit Capem Dalu-Dalu	1. Denny M. Akbar 2. Afrial Abdullah 3. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 4. Divisi PKB
15	15 Februari 2016	1. Rapat Pembahasan Beberapa Masalah Kredit di Cabanag/Capem. 2. Masalah Penerbitan Obligasi. 3. Dana Pensiun BRK	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Hukum 5. Staf Direksi
16	18 Februari 2016	Diskusi Proyeksi Laba Rugi Akhir Februari 2016 dan Pola Pentarifan CKPN	1. Denny M. Akbar 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi
17	22 Februari 2016	Rapat Pembahasan Perkiraan Laba Februari 2016	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Seluruh Pemimpin Divisi & Desk
18	23 Februari 2016	Rapat Pembahasan Kredit Bermasalah (NPL)	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi Komersial

			5. Divisi PKB
19	25 Februari 2016	Rapat Pembahasan NPL Kantor Cabang Pasar Pusat dan Capem dibawahnya	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Staf Direksi 8. Unit Kerja Terkait
20	29 Februari 2016	Rapat Pembahasan Perkiraan Laba Februari 2016	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional 5. Pemimpin Divisi Umum 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Staf Direksi
21	04 Maret 2016	Rapat Pembahasan Kredit Bermasalah (NPL)	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Afrial Abdullah 4. Pemimpin Divisi Komersial 5. Staf Direksi 6. Divisi PKB
22	08 Maret 2016	Rapat Pembahasan Masalah NPL di beberapa Kantor Capem	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Denny M. Akbar 4. Staf Direksi 5. Unit Kerja Terkait
23	14 Maret 2016	Rapat Pembahasan Masalah NPL	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Denny M. Akbar 4. Staf Direksi 5. Unit Kerja Terkait
24	16 Maret 2016	Rapat Pembahasan Masalah NPL	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Staf Direksi 4. Unit Kerja Terkait
25	17 Maret 2016	Rapat Pembahasan Fasilitas Direksi	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Umum 4. Staf Divisi Umum 5. Staf Divisi MSDM
26	22 Maret 2016	Rapat Pembahasan Kredit Bermasalah dan Strategi Perbaikan NPL	1. Denny M. Akbar 2. Afrial Abdullah 3. Pemimpin Divisi Umum 4. Pemimpin Divisi Komersial 5. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 6. Staf Direksi 7. Unit Kerja Terkait
27	23 Maret 2016	Rapat Rutin Pembahasan NPL	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Pemimpin Divisi PKB 4. Pemimpin Divisi Komersial 5. Staf Direksi
28	30 Maret 2016	Rapat Pembahasan Masalah Kasus *Fraud*	1. Irvandi Gustari

			2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Pemimpin SKAI 7. Pemimpin Divisi TSI
29	07 April 2016	Rapat Presentasi hasil Audit Umum SKAI TW I	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. SKAI
30	07 April 2016	Rapat Presentasi Proyek-Proyek yang akan Disindikasikan oleh BNI selama tahun 2016	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Staf BNI 4. Pemimpin Divisi Komersial 5. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan
31	12 April 2016	Rapat Rutin NPL	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi PKB 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Staf Direksi 7. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM
32	12 April 2016	Rapat Strategi Peningkatan Kualitas Layanan PT. Bank Riau Kepri tahun 2016	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. *Desk Service Quality*
33	12 April 2016	Rapat Rutin NPL	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Afrial Abdullah 4. Pemimpin Divisi PKB 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Staf Direksi 7. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM
34	13 April 2016	Rapat Progress Seleksi Jabatan dan Mutasi Pegawai	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Pemimpin Divisi MSDM
35	13 April 2016	Rapat Pembahasan RKAT tahun 2016 Dana Pensiun dan Penetapan Pengurus Dana Pensiun Bank Riau Kepri	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi Denny M. Akbar 5. Pemimpin Divisi MSDM 6. Ketua Dapen BRK
36	19 April 2016	Rapat Pembahasan Kenaikan NPL dan Strategi Pengendaliannya	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Afrial Abdullah 4. Pemimpin Divisi PKB 5. Unit Kerja Terkait
37	20 April 2016	Rapat Pra Komite Sindikasi PT. Cakrawala Andalas Televisi dan PT. Lativi Media Karya	1. Irvandi Gustari 2. Nizam

			3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Pemimpin Divisi PKB 6. Pemimpin Divisi Komersial 7. Pemimpin Divisi Hukum 8. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM
38	25 April 2016	Rapat Pembahasan Pembukaan Kantor Cabang Jakarta	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi TSI 5. Pemimpin Divisi Umum 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
39	25 April 2016	Rapat Pembahasan Terhadap Tenaga Ahli Komite	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Pinbag Divisi MSDM
40	26 April 2016	Pembahasan Pemenuhan Dana Jangka Panjang	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Trasury & Internasional
41	16 Mei 2016	Rapat Pra RUPS Tahun Buku 2016 dan RUPSLB tahun 2016	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Dewan Komisaris 7. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 8. Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan 10. Pemimpin Divisi Hukum 11. Pemimpin *Desk Corporate Secretary*
42	16 Mei 2016	Pembahasan Tindak Lanjut dari Pertemuan Direksi dengan OJK tanggal 13 Mei 2016 tentang Pembahasan TKB dan GCG Bank	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 5. Pemimpin SKAI
43	18 Mei 2016	Rapat IT *Steering Committee* Bank Riau Kepri	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Eka Afriadi 4. Denny M. Akbar 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis / Pgs. Pemimpin Divisi MSDM 9. Pemimpin Divisi

			Kepatuhan
44	20 Mei 2016	Rapat Pembahasan Masalah NPL	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Unit Kerja Terkait
45	23 Mei 2016	Rapat Pembahasan Penurunan NPL	1. Afrial Abdullah 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Komersial 4. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 5. Pemimpin Divisi Syariah 6. Unit Kerja Terkait
46	27 Mei 2016	Rapat *Progress Learning Center* Bank Riau Kepri	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 4. Pinbag Divisi Umum 5. Pinbag Divisi MSDM
47	06 Juni 2016	Rapat Pelayanan Kas Keliling Bank Riau Kepri	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 4. Pemimpin Divisi Trasury & Internasional 5. Pemimpin Cabang Utama
48	07 Juni 2016	Rapat Perkembangan Kasus-kasus yang Terjadi di Bank Riau Kepri	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Unit Kerja Terkait
49	13 Juni 2016	Rapat Pembahasan Masalah NPL	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Denny M. Akbar 4. Unit Kerja Terkait
50	14 Juni 2016	Rapat *Review* SK Kebjiaksanaan Perkreditan Bank (KPB) dan *Review* SK Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Unit Kerja Terkait
51	14 Juni 2016	Rapat Perkiraan Laba, Jasa Produksi dan THR	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Unit Kerja Terkait
52	28 Juni 2016	Rapat Estimasi Laba Juni 2016	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional 7. Pemimpin Divisi Trasury & Internasional 8. Pemimpin Divisi Umum 9. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 10. Staf Direksi 11. Divisi Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
53	29 Juni 2016	Pembahasan Revisi RBB PT. Bank Riau	1. Irvandi Gustari

		Kepri tahun 2016	2. Afrial Abdullah 3. Nizam 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Dewan Komisaris 7. Divisi Perencanaan Strategis
54	06 Juli 2016	Rapat Pembahasan Pokok-pokok Hasil Audit Umum (Intern) Semester I tahun 2016	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. SKAI
55	12 Juli 2016	Rapat Koordinasi Direksi	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Eka Afriadi 4. Denny M. Akbar
56	12 Juli 2016	Rapat Pembahasan LDR	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Eka Afriadi 4. Denny M. Akbar 5. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 6. Pemimpin Divisi Trasury & Internasional
57	13 Juli 2016	Rapat Pembahasan Masalah NPL	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Staf Direksi 4. Divisi PKB 5. Divisi Konsumer 6. Divisi MKM 7. Divisi Komersial
58	18 Juli 2016	Rapat Pembahasan Progress dan Rencana Inplementasi SIMDA Online	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 4. Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa
59	28 Juli 2016	Rapat Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank periode Juni 2016	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Denny M. Akbar 6. Anggota Komite Manajemen Risiko
60	29 Juli 2016	Rapat Pembahasan Perkiraan Laba pada akhir Juli 2016	1. Irvandi Gustari 2. Nizam 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Seluruh Pemimpin Divisi/*Desk*
61	01 Agustus 2016	Pembahasan Pembukaan Kantor Cabang Jakarta dan Kantor Lainnya tahun 2016	1. Irvandi Gustari 2. Afrial Abdullah 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Umum
62	18 Agustus 2016	Rapat Pembahasan Masalah NPL	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Konsumer & MKM 4. Staf Direksi
63	22 Agustus 2016	Rapat Pembahasan Percepatan Laba Bank	1. Irvandi Gustari

		tahun 2016	2. Denny M. Akbar 3. Afrial Abdullah 4. Eka Afriadi 5. Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa 6. Pgs. Pemimpin Divisi PKB 7. Pemimpin SKAI 8. Pemimpin Divisi Komersial 9. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 10. Staf Direksi
64	06 September 2016	Rapat Pembahasan Pembagian Tugas Direktur Dana & Jasa dan Direktur Kredit & Syariah kepada Direktur Utama & Direktur Operasional PT. Bank Riau Kepri	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pgs. Pemimpin Divisi MSDM
65	09 September 2016	Rapat Pembahasan Pembagian Tugas Direktur Dana & Jasa dan Direktur Kredit & Syariah kepada Direktur Utama & Direktur Operasional PT. Bank Riau Kepri	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pgs. Pemimpin Divisi MSDM
66	09 September 2016	1. Pembahasan Calon Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Bank Riau Kepri 2. Pembahasan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yastera	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Unit Kerja Terkait
67	13 September 2016	Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Obligasi, Penambahan Modal dan Revaluasi Aset	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 4. Pemimpin Divisi Umum 5. Pemimpin Divisi Hukum 6. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional 7. Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin Divisi Kepatuhan
68	16 September 2016	Rapat Pembahasan Terkait Hasil Audit Divisi Teknologi & Sistem Informasi	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. SKAI
69	19 September 2016	Rapat Pembahasan Percepatan Penyaluran Kredit, Penanganan Kredit Bermasalah (NPL) dan Efisiensi Biaya	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Seluruh Pemimpin Divisi/ Desk
70	20 September 2016	Rapat Strategi untuk Meraih Juara Pertama Nasional Pelayanan	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Divisi MSDM 4. *Desk Service Quality*

71	20 September 2016	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 5. Pemimpin *Desk Corporate Secretary*
72	20 September 2016	Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Seminar GCG	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin *Desk Corporate Secretary* 4. Divisi Hukum 5. Divisi MSDM
73	30 September 2016	Rapat Pembahasan Rencana Penambahan Modal	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
74	30 September 2016	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Persiapan Seminar	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Divisi MSDM 4. Divisi Hukum 5. Divisi Umum
75	04 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Surat dari Dispenda Kota Batam	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa 5. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 6. Pemimpin Divisi Umum
76	11 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Likuiditas dan Kerjasama BPJS	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa 4. Pemimpin *Desk Corporate Secretary* 5. Divisi Treasury & Internasional
77	11 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Terkait Kontrak Kerja Tim Tenaga Ahli Building Management Gedung MDMBRK	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Divisi Umum
78	19 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Direksi (KUD) tahun 2017	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Seluruh Pemimpin Divisi 5. Staf Direksi
79	24 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil *Prudential Meeting* dengan OJK	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 5. Pemimpin Divisi MSDM 6. Pemimpin Divisi PKB

80	31 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Direksi tahun 2017	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk 5. Staf Direksi
81	31 Oktober 2016	Rapat Hasil Audit Umum Cabang Dumai dan Cabang Tanjung Pinang	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin SKAI
82	31 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Surat Dispenda Kota Batam perihal Kerjasama Pengelolaan Pajak Daerah Secara Elektronik	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 5. Pemimpin Divisi Umum
83	21 November 2016	Rapat Pembahasan *Road Map* Percepatan Penurunan NPL tahun 2016	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Divisi PKB
84	21 November 2016	Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk 5. Staf Direksi
85	01 Desember 2016	Rapat Konsolidasi Permintaan Tempat Khusus Penyetoran Pendapatan Bus TMP Dishub Kota Pekanbaru	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Pemimpin Divisi MSDM 4. Pemimpin Cabang Utama 5. Pemimpin Cabang Pasar Pusat
86	01 Desember 2016	Rapat Pembahasan Audit Umum dan Audit Khusus pada Beberapa Jaringan Kantor Bank	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. SKAI
87	14 Desember 2016	Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama dengan Broker Asuransi	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Pemimpin Divisi Konsumer 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi PKB 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 9. Pemimpin Divisi Syariah 10. Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional
88	20 Desember 2016	1. Evaluasi Kinerja Akhir Tahun Buku 2016 2. Penyampaian Keputusan Rakerwil FKDK/P BPDSI Wilayah Barat	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Dewan Komisaris 5. Pemimpin Divisi

			Perencanaan Strategis 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
89	28 Desember 2016	Rapat Pembahasan *Risk Appetite Statement* tahun 2017	1. Irvandi Gustari 2. Denny M. Akbar 3. Eka Afriadi 4. Anggota Komite Manajemen Risiko
90	28 Desember 2016	Rapat Pembahasan Pemenuhan Prinsip-Prinsip GCG dalam Pelaksanaan Evaluasi Penggunaan Sistem Pialang Asuransi	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan 4. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
91	31 Desember 2016	Rapat Pembahasan dan Usulan Sanksi terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	1. Irvandi Gustari 2. Eka Afriadi 3. Denny M. Akbar 4. Pemimpin Divisi MSDM

Hasil rapat dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinion*, serta dibagikan kepada seluruh anggota Direksi dan pihak terkait, dan selanjutnya hasil rapat merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan.

Tingkat kehadiran anggota Direksi secara fisik dalam rapat Direksi baik yang diselenggarakan internal Direksi maupun mengundang unit kerja terkait dan undangan Dewan Komisaris, dapat terlihat di dalam tabel berikut :

No	Direksi	Jabatan	Kehadiran (dari total 91 kali rapat)		
			Total Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
1	Irvandi Gustari	Direktur Utama	91	83	91 %
2	Nizam	Direktur Dana & Jasa	63	28	44 %
3	Afrial Abdullah	Direktur Kredit & Syariah	63	44	70 %
3	Denny Muliya Akbar	Direktur Operasional	84	66	79 %
5	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	91	56	62 %

Jumlah kehadiran rapat di atas, merupakan rapat yang dilaksanakan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris dan Divisi terkait. Di samping Direksi menyelenggarakan rapat sebagaimana diatur di atas, masing-masing Direksi telah menyelenggarakan rapat dengan unit kerja di bawah supervisinya, sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR UTAMA		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	04 Januari 2016	*Learning Program* PT. Bank Riau Kepri tahun 2016
2	18 Januari 2016	Pembahasan Produk BRK Peduli dan BLUD
3	26 Januari 2016	Rapat Koordinasi *Desk Corporate Secretary*
4	22 Februari 2016	Rapat Pembahasan Fasilitas Direksi
5	24 Februari 2016	Rapat Pembahasan NPL Capem Bagan Batu
6	08 Maret 2016	1. Rapat Pembahasan Percepatan Proses *Spin Off* Syariah 2. Sosialisasi serta *Launching* Implementasi Pengelolaan Asuransi Kredit melalui Broker Asuransi
7	30 Maret 2016	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Mediasi Kasus Sdr. Rizky ND Putra
8	22 April 2016	Rapat Pengaktifan Perpustakaan dan *Learning Center* Bank Riau Kepri
9	26 April 2016	Pembahasan Pembukaan KCPS Pasir Pangaraian
10	11 Mei 2016	Pembahasan *Copy Awards* dan Foto Kunjungan Direksi serta Hal Lainnya
11	08 Juni 2016	Rapat Pembahasan Rencana *Workshop* Sistem Pembinaan BUMD di Lingkungan Provinsi Riau
12	17 Juni 2016	Rapat Pembahasan Rencana *Workshop* Peranan Obligasi sevagai Penguatan Pembiayaan Jangka Panjang dan IPO untuk Peningkatan Daya Saing sebagai *"Corporate Action"* dalam Era Globalisasi
13	11 Juli 2016	Rapat Pembahasan Videotron Bank Riau Kepri
14	11 Juli 2016	Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Seminat, Workshop dan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2016
15	12 Juli 2016	Pembahasan Rencana Pembuatan Video Company Profile Bank Riau Kepri
16	14 Juli 2016	Rapat Koordinasi Persiapan Seminar dan Workshop
17	28 Juli 2016	Rapat Pelaksanaan Program Kemitraan Bank riau Kepri untuk Pemerintah Provinsi Riau
18	08 Agustus 2016	Pembahasan Laporan Studi Banding dan Program Kerja Divisi MSDM
19	15 Agustus 2016	Rapat Pembahasan Masalah LDR
20	15 Agustus 2016	Rapat Percepatan Pencapaian Target tahun 2016
21	24 Agustus 2016	Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Market Share DPK Wilayah Kota Batam dan Wilayah Kota Pekanbaru
22	06 September 2016	Simulasi Pencapaian Target tahun 2016
23	06 September 2016	Rapat Strategi Pencapaian Target Laba dari Sisi Lending
24	09 September 2016	Rapat Pemasangan Foto Kunjungan Dewan Komisaris dan Direksi
25	19 September 2016	1. Pembahasan persiapan pemberian secara simbolis Kredit KUR kepada debitur Bank Riau Kepri dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan dinas terkait 2. Penyaluran kredit secara GCG
26	20 September 2016	Rapat Pembahasan Fasilitas KMK Atas Dasar Kontrak dan Penerbitan L/C an. PT. Ady Putra Prima Kencana
27	30 September 2016	Rapat Pembahasan Progress Review Kerjasama dengan Broker Asuransi Kredit Konsumer dan Pengadaan Kerjasama dengan Broker untuk Kredit Produktif
28	05 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Pertemuan dengan LPPI
29	10 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Target dan Realisasi Kredit Menjelang Akhir Tahun 2016
30	12 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Pencapaian Laba Akhir Tahun 2016
31	18 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Program Kerja Divisi MKM
32	20 Oktober 2016	Rapat Peningkatan Kualitas Pelayanan Unit Kantor Syariah
33	20 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Program Kerja Divisi MSDM
34	24 Oktober 2016	Rapat Pembahasan *Road Map* Percepatan Penurunan NPL terhadap target NPL Konsolidasi Desember 2016
35	01 November 2016	Rapat Pembahasan Kinerja Perkreditan dan Syariah tahun 2016
36	05 November 2016	Rapat Pembahasan *Blue Print* Bank Riau Kepri Syariah
37	23 November 2016	Rapat Pelaksanaan Undian Tabungan Sinar Tebar Milyar
38	24 November 2016	Rapat Pembahasan Rencana Pelaksanaan Forum Diskusi Perbaikan Kualitas Pelayanan antara Perwakilan Frontliner dan Pemimpin Seksi

39	29 November 2016	Rapat Pembahasan Program Kerja Divisi MSDM
40	30 November 2016	Rapat Perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
41	07 Desember 2016	Rapat Perbaikan Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Program Budaya Kerja Produktif
42	09 Desember 2016	Rapat Pembahasan Perkembangan LDR Bank
43	09 Desember 2016	Rapat Presentasi Pemasangan Poster Award dan Presentasi Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2016
44	15 Desember 2016	Rapat Pembahasan Kesiapan Bank sebagai Kandidat Penerima Penghargaan Top CSR 2017
45	31 Desember 2016	Rapat Pembahasan Program Kerja SDM dan LSPP
46	31 Desember 2016	Rapat Pembahasan Kegiatan Acara Penyerahan Sertifikat Apresiasi Award dan Penutupan Masa Orientasi PCP 2016

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR DANA DAN JASA

No	Tanggal	Materi Rapat
1	04 Januari 2016	Rapat Likuiditas Awal Tahun 2016
2	04 Januari 2016	Rapat Pembahasan Progress Kinerja *Desk Service Quality* tahun 2015 dan Program Kerja tahun 2016
3	25 Januari 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Januari 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Januari 2016 3. Membahas dampak dari Permenkeu No. 235/PMK.07/2015 terhadap DPK Pemda
4	12 April 2016	Rapat Strategi Peningkatan Kualitas Layanan PT. Bank Riau Kepri tahun 2016
5	06 Juni 2016	Rapat Pelayanan Kas Keliling Bank Riau Kepri
6	06 Juni 2016	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Nasabah PT. Bank Riau Kepri Capem Belilas

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR OPERASIONAL

No	Tanggal	Materi Rapat
1	11 Februari 2016	Pembahasan Permasalahan Kredit Kopsa Peta Capem Sorek dan Roadmap Penurunan Debitur NPL 2016
2	15 Februari 2016	1. Kebijakan CKPN 2. Rekonsiliasi Data Transaski ATM 3. Penyempurnaan Mekanisme Transaski BV
3	15 Februari 2016	Pengkajian dan Penyempurnaan BPP PKB
4	18 Februari 2016	Rapat Koordinasi Pemakaian Ruang Pelatihan Lantai 5 serta Ketentuan Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri
5	17 Mei 2016	Rapat Pembahasan Pengendalian NPL
6	10 Juni 2016	Rapat SK Perubahan Pertama BPP PKB
7	21 November 2016	Rapat Pembahasan *Road Map* Percepatan Penurunan NPL tahun 2016
8	21 November 2016	Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2017
9	01 Desember 2016	Rapat Konsolidasi Permintaan Tempat Khusus Penyetoran Pendapatan Bus TMP Dishub Kota Pekanbaru
10	23 Desember 2016	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Finalisasi Tax Amnesty dan Upaya Peningkatan Layanan ATM

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR KREDIT DAN SYARIAH		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	12 Januari 2016	Pematangan SOT PT. Bank Riau Kepri tahun 2016
2	18 Januari 2016	Pembahasan Produk BRK Peduli dan BLUD
3	26 Januari 2016	Rapat Monitoring Kredit
4	29 Januari 2016	Rapat Monitoring Kredit dan NPL
5	09 Februari 2016	Rapat Koordinasi Direktorat Kredit & Syariah
6	09 Februari 2016	Penanganan Kredit NPL Capem Sorek
7	11 Februari 2016	Pembahasan Kredit Macet Capem Sorek
8	15 Februari 2016	Rapat Pembahasan Kredit Capem Dalu-Dalu
9	01 Maret 2016	Evaluasi dan Rencana Kerja Direktorat Kredit
10	02 Maret 2016	Rapat Pembahasan Kredit Bermasalah Capem Sorek
11	18 Maret 2016	Penanganan Kredit NPL Capem Sorek
12	22 Maret 2016	Rapat Pembahasan Kredit Bermasalah dan Strategi Perbaikan NPL
13	23 Maret 2016	Rapat Rutin Pembahasan NPL
14	18 Mei 2016	Rapat Monitoring dan Evaluasi Kredit NPL
15	23 Mei 2016	Rapat Pembahasan Penurunan NPL
16	27 Juli 2016	Pembahasan Draft Laporan Profil Risiko Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah periode Juni 2016
17	01 Agustus 2016	Rapat Pembahasan SK Wewenang Memutus Kredit & Bank Garansi dan Metode Penilaian / Kriteria Penetapan Limit Wewenang Memutus Kredit & Bank Garansi untuk Pimpinan Unit Kantor

AKTIVITAS RAPAT DIREKTUR KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO		
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**
1	22 Januari 2016	Rapat Pembahasan *Self Assesment* Pelaksanaan GCG periode Semester II tahun 2015
2	19 April 2016	Pembahasan Laporan Profil Risiko periode 31 Maret 2016
3	16 Mei 2016	Pembahasan Tindak Lanjut Pertemuan Direksi dengan OJK tentang Pembahasan TKB dan GCG Bank
4	08 Agustus 2016	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK yang telah Jatuh Tempo
5	24 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil *Prudential Meeting* dengan OJK
6	07 Oktober 2016	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
7	28 Desember 2016	Rapat Pembahasan Pemenuhan Prinsip-Prinsip GCG dalam Pelaksanaan Evaluasi Penggunaan Sistem Pialang Asuransi

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Bank dilakukan melalui laporan *self assessment* GCG yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure, governance process*, dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan GCG sesuai Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum tersebut. Parameter penilaian kinerja

Direksi meliputi prinsip-prinsip TARIF dalam GCG terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri.

Selain melalui *self assessment*, penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini terlihat pada saat pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2016 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui laporan tahunan tahun buku 2015 yaitu laporan pengawasan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2015.

Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain Direksi

Sepanjang tahun 2016 jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang meliputi remunerasi dalam bentuk natura dan non natura yang diberikan kepada Direksi adalah sebesar Rp20.259.630.715,-

Jumlah di atas merupakan remunerasi yang diberikan kepada Direksi untuk periode Januari s/d Desember 2016.

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2016, sebagai berikut :

Jenis Penerimaan	Jumlah Direksi	Nominal (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	6*	19.723.175.052,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	5	536.455.663,-
Jumlah Penerimaan		**20.259.630.715,-**

Keterangan :

* Sepanjang tahun 2016 jumlah Direksi Bank adalah lima orang, namun untuk pembayaran tantiem tahun 2016 selain dibayarkan kepada lima orang Direksi Bank, juga dibayarkan kepada seorang Direksi (Wan Marwan) yang masa jabatannya sebagai Direktur Operasional berakhir Juni 2015.

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2016 yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, terlihat dalam tabel di bawah ini :

Kelompok Nominal Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Direksi
Di atas Rp 2 miliar	5
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1*
Rp 500 juta ke bawah	-
Total	**6****

Keterangan :

* Untuk kelompok nominal remunerasi di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar adalah Direktur Operasional (Wan Marwan) yang masa jabatannya berakhir per April 2015.

** Sepanjang tahun 2016 jumlah Direksi Bank adalah lima orang, namun untuk pembayaran tantiem tahun 2016 selain dibayarkan kepada lima orang Direksi Bank, juga dibayarkan kepada seorang Direksi (Wan Marwan) yang masa jabatannya sebagai Direktur Operasional berakhir Juni 2015.

Program Pelatihan dan Seminar Direksi

Sepanjang tahun 2016, Direksi Bank telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar/*workshop* yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal yaitu BI/OJK dan dari lembaga pelatihan yang ada di Indonesia, antara lain :

Nama	Materi Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan/Seminar	Tempat &Waktu Pelaksanaan
Irvandi Gustari	*Workshop* Strategi Bersaing di Tengah Turbulensi	Divisi MSDM	Pekanbaru, 12 Februari 2016
	High Level Seminar dan *Workshop* Tranformasi BPD	Asbanda	Jakarta, 23 Mei 2016
	Workshop Peranan Obligasi sebagai Penguatan Pembiayaan Jangka Panjang dan IPO untuk Peningkatan Daya Saing sebagai "*Corporate Action*" dalam Era Globalisasi	Divisi Treasury & Internasional	Pekanbaru, 24 Juni 2016
	Seminar Pengelolaan SDM Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Penanganan Hubungan Industrial Dalam konteks GCG Serta *Workshop* Pengelolaan Kredit Bermasalah Tinjauan Pengelolaan Bank dan Hukum	Divisi MSDM	Pekanbaru, 20 Juli 2016
	Seminar Nsional BPDSI *Tax Amnesty,* Sebuah Tantangan sekaligus Peluang bagi BPDSI	Asbanda	Surabaya, 03 September 2016
	Seminar nasional pelaksanaan GCG, Pemahaman tindak pidana perbankan dan kepatuhan terhadap kerahasiaan dokumen perusahaan	Divisi MSDM & Divisi Hukum	Pekanbaru, 07 Oktober 2016
	Study Trip ke Sparkanssen-Finanzgruppe Jerman	Asbanda	Jerman, 12 November 2016

Denny Muliya Akbar	*Workshop* Strategi Bersaing di Tengah Turbulensi	Divisi MSDM	Pekanbaru, 12 Februari 2016
	Pelatihan IT *Master Plan*	LAPI ITB	Bandung, 28 Maret 2016
	Sosialisasi Penyempurnaan Pokok-Pokok Ketentuan Penyelenggaraan SKNBI dan Rencana Aktivasi Layanan *Bulk Payment*	Bank Indonesia	Jakarta, 20 April 2016
	Optimalisasi *Asset Liablity Management* (ALMA) Dalam Pencapaian Target *Nett Income* (NII) Dengan Menjaga Kepatuhan Pada Batasan Risiko Lukuiditas dan BASEL III	Nayottama	Jakarta, 01 Juni 2016
	Pelatihan Manajemen Risiko Level Eksekutif	Sentramark Business Management	Jakarta, 15 Juli 2016
	Seminar Pengelolaan SDM Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Penanganan Hubungan Industrial Dalam konteks GCG serta *Workshop* Pengelolaan Kredit Bermasalah Tinjauan Pengelolaan Bank dan Hukum	Divisi MSDM	Pekanbaru, 20 Juli 2016
	Asia's 8th *Annual Premier Banking Technology Event*	Knowledge	Jakarta, 24 Agustus 2016
	Seminar Nasional Inovasi Tehnologi Perbankan dalam Antisipasi *Digital Crime*	Infobank	Jakarta, 06 Oktober 2016
	Seminar *Banking In The New World*	Fortress Data Service	Bali, 09 Oktober 2016
	Business Continuity Management (BCM) Intermediate Level : Best Practise Penyusunan Kebijakan dan Prosedur serta Uji Coba BCM	Nayottama	Bandung, 27 Oktober 2016
	Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun pada BPDSI	Asbanda	Jakarta, 23 November 2016
	Silaturahim & Sosialisasi Fatwa	Dewan Syariah	Jakarta, 24

Afrial Abdulah	Terbaru DSN-MUI	Nasional MUI	Februari 2016
	Workshop Restrukturisasi dan Penyelematan Kredit Yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank	BSMR	Jakarta, 10 April 2016
	Undangan Rangkaian Acara Sidang Tahunan *Islamic Development Bank* Ke-41	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta, 17 Mei 2016
	Workshop Peranan Obligasi sebagai Penguatan Pembiayaan Jangka Panjang dan IPO untuk Peningkatan Daya Saing sebagai "*Corporate Action*" dalam Era Globalisasi	Divisi Treasury & Internasional	Pekanbaru, 24 Juni 2016
Nizam	*Workshop* Strategi Bersaing di Tengah Turbulensi	Divisi MSDM	Pekanbaru, 12 Februari 2016
	Seminar Iklim Usaha dan Produk Jasa Perbankan untuk Solusi Keuangan yang Tepat	PT. Bank Panin	Hongkong, 05 Mei 2016
	Sosialisasi Hasil Pengukuran Layanan Bank Riau Kepri Dalam Ajang BSEM Angkatan 1	*Desk Service Quality*	Pekanbaru, 13 Mei 2016
	Seminar Pengelolaan SDM Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Penanganan Hubungan Industrial Dalam konteks GCG serta *Workshop* Pengelolaan Kredit Bermasalah Tinjauan Pengelolaan Bank dan Hukum	Divisi MSDM	Pekanbaru, 20 Juli 2016
Eka Afriadi	*Workshop* Strategi Bersaing di Tengah Turbulensi	Divisi MSDM	Pekanbaru, 12 Februari 2016
	Workshop Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* / GCG) Sebagai Pilar Keberhasilan Bank	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Jakarta, 29 Februari 2016
	Training Governance, Risk & Compliance (GRC)	PT. Johnson Indonesia	Jakarta, 10 Maret 2016
	Undangan Kegiatan Diseminasi	PPATK	Jakarta, 15 Maret 2016

	Workshop Restrukturisasi dan Penyelematan Kredit Yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank	BSMR	Jakarta, 10 April 2016
	Workshop dan Uji Sertifikasi Kepatuhan & AML *Level* 3 *Batch* 1 Bagi Seluruh Direktur Kepatuhan Bank	LSPP	Jakarta, 21 April 2016
	Seminar Meningkatkan Daya Saing Perbankan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	LPPI	Jakarta, 12 Mei 2016
	High Level Seminar dan *Workshop* Tranformasi BPD	Asbanda	Jakarta, 23 Mei 2016
	Seminar Kesiapan Perbankan Dalam Menghadapi Penilaian *Financial Action Task Force* (FATF) Terhadap Indonesia	FKDKP	Jakarta, 26 Mei 2016
	Sosialisasi Mengenai Pembukaan Seminar Internasional OJK *Empowering* MSMEs *Through Financial Literacy And Inclusion*	OJK	Jakarta, 01 Juni 2016
	Seminar Pengelolaan SDM Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Penanganan Hubungan Industrial Dalam konteks GCG Serta Workshop Pengelolaan Kredit Bermasalah Tinjauan Pengelolaan Bank dan Hukum	Divisi MSDM	Pekanbaru, 20 Juli 2016
	Sosialisasi Ketentuan Pemantauan Kegiatan LLD Bank	Bank Indonesia	Jakarta, 22 Juli 2016
	Workshop Managing Anti Money Laundering : Implications of Tax Amnesty Policy in Banking Sector	Infobank	Jakarta, 25 Agustus 2016
	Workshop Risk Based Bank Rating (RBBR) Kepada Bank Pembangunan Daerah	OJK	Medan, 01 September 2016

	Seminar nasional pelaksanaan GCG, Pemahaman tindak pidana perbankan dan kepatuhan terhadap kerahasiaan dokumen perusahaan	Divisi MSDM & Divisi Hukum	Pekanbaru, 07 Oktober 2016
	Sosialisasi Perizinan/Persetujuan kepersertaan Bank di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan uang Rupiah serta Makroprudensial	Bank Indonesia	Jakarta, 21 Oktober 2016
	Sosialisasi Pentingnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Bagi Industri Perbankan	LAPSPI	Jakarta, 24 Oktober 2016
	Sosialisasi Pokok-pokok Ketentuan Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank dan Nasabah	Bank Indonesia	Jakarta, 26 Oktober 2016
	Seminar FKDKP untuk Level Pengurus Bank	FKDKP	Jakarta, 03 November 2016
	Workshop Sertifikasi CRGP + Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko IV	PT. RAP Asia Consulting	Lombok, 22 November 2016

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi, yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pendahuluan, meliputi :
   a. Dasar Hukum
   b. Istilah Yang Digunakan
2. Direksi, meliputi :
   a. Visi Dan Misi
   b. Tujuan
   c. Fungsi
   d. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
   e. Persyaratan Untuk Menjadi Direksi

f. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

g. Masa Jabatan

h. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas

i. Etika Kerja dan Jabatan

j. Waktu Kerja

k. Tugas dan Tanggung jawab

l. Hak dan Kewenangan

m. Rapat Direksi

n. Pembagian Tugas Antar Direksi

o. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi

p. Komite-komite Direksi

q. Hubungan Kerja Antara Direksi dan Dewan Komisaris

r. Penggunaan Saran Profesional

RASIO GAJI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jabatan	Gaji (Rp)		Rasio Perbandingan (%)
		Tertinggi	Terendah	
1	Gaji Dewan Komisaris	62.400.000,-	56.160.000,-	90
2	Gaji Direksi	78.000.000,-	70.200.000,-	90
3	Gaji Pegawai Tetap	23.086.000,-	3.200.000,-	13,86
4	Gaji Pegawai Tidak Tetap	4.712.500,-	1.925.000,-	40,85
5	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	78.000.000,-	23.086.000,-	29,60

Komposisi Pegawai

Sampai dengan Desember 2016 jumlah pegawai Bank Riau Kepri (pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap) berjumlah 1.937 orang.

Komposisi pegawai sebagaimana diuraikan di bawah ini merupakan uraian komposisi pegawai Bank Riau Kepri dengan status pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

1. Komposisi Pegawai Tetap (PT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan tingkat usia pada tahun 2016

No	Usia Pegawai	(PT)	(PTT)	Jumlah
1	>55	0	0	0
2	50 – 55	93	95	98
3	40 – 49	179	43	222
4	30 – 39	706	262	968
5	23 – 29	224	405	629
6	≤ 23	1	19	20
Total		**1.203**	**734**	**1.937**

2. Komposisi Pegawai Tetap berdasarkan jabatan pada tahun 2016

No	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi	17
2	Staf Direksi	1
3	Pemimpin Bagian Kantor Pusat	22
4	Pemimpin Cabang Konvensional	17
5	Pemimpin Cabang Syariah	2
6	Setingkat Pemimpin Cabang Utama	2
7	Pemimpin Cabang Pembantu	43
8	Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat	2
9	Pemimpin Setingkat Pincapem	22
10	Pemimpin Seksi Setingkat	292
11	Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	11
12	Pelaksana	457
13	Pegawai *Core* (Teller/CS)	267
14	Supir	10
15	Satpam	37
16	Juru Layan	1
Total		**1.203**

3. Komposisi Pegawai Tidak Tetap berdasarkan jabatan pada tahun 2016

No	Jabatan	Jumlah
1	Pegawai Administrasi	53
2	Teller/CS/Pemasar/*Funding Officer*/Penyelamatan Kredit	307
3	Supir	56
4	Satpam	213
5	Operator Telepon	2
6	Petugas Ekspedisi	4
7	Pembantu Rumah Tangga	2

8	Petugas Jaga Malam	9
9	Petugas Kebersihan	79
10	Penjaga Gudang	1
11	Tenaga *Replenishment* ATM	8
Total		**734**

4. Komposisi Pegawai (tetap dan tidak tetap) berdasarkan pendidikan pada tahun 2016

No	Keterangan	Jumlah
1	Doktor	2
2	Pasca Sarjana	58
3	Sarjana	1.181
4	Diploma (D1 & D3)	267
5	SLTA	402
6	SLTP	22
7	SD	5
Total		**1.937**

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Struktur organisasi tersebut dibentuk sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

KOMITE AUDIT

Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Untuk komposisi Komite Audit sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK Direksi No. 19/KEPDIR/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, komposisi Komite Audit adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Audit Berdasarkan SK Direksi No. 19/KEPDIR/2016		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Sarjono Amnan	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

2. Dengan berakhirnya masa jabatan ketua merangkap anggota komite yaitu Sarjono Amnan sebagai Komisaris Bank per 31 Agustus 2016, maka ketua Komite Audit (merangkap anggota) selanjutnya dijabat oleh A. Rivaie Rachman yang ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit per September 2016 berdasarkan SK Direksi No. 59/KEPDIR/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 19/KEPDIR/2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, sehingga komposisi Komite Audit adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Susunan Keanggotaan Komite Audit Berdasarkan SK Direksi No. 59/KEPDIR/2016		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
A. Rivaie Rachman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank terdiri dari Komisaris independen dan pihak independen. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Anggota Komite Audit Bank telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat secara profesional yang independen kepada Dewan Komisaris dibidang laporan keuangan dari Direksi, auditor internal, auditor eksternal, serta mereview laporan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen

risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Good Corporate Governance* Bank Riau Kepri antara lain adalah :

1. Menindaklanjuti hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Komisaris.
2. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh SKAI.
3. Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI.
4. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin SKAI oleh Direksi dan dilaporan kepada Bank Indonesia.
5. Menyetujui *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan SKAI.
7. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa Bank mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku.
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk.
10. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
11. Mengevaluasi masalah-masalah pajak dan hukum yang membutuhkan penanganan khusus.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Audit

1. Rencana Kegiatan/Program Kerja Komite Audit

Untuk tahun 2016 Komite Audit telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

a. Melakukan rapat rutin Komite Audit untuk membahas Laporan Hasil Audit Umum.

b. Melakukan rapat Komite Audit dengan Auditor Indenden/KAP.

c. Melakukan rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

d. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

e. Melakukan kunjungan pengawasan ke Kantor Cabang.

f. Melakukan rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.

g. Melakukan pembahasan laporan keuangan dan laporan realisasi Rencana Bisnis Bank serta laporan kinerja Bank.

h. Membuat laporan tahunan Komite Audit.

2. Realisasi Kegiatan Komite Audit

Sepanjang tahun 2016 Komite Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja dan tugas serta tanggung jawabnya, meliputi sebagai berikut :

a. Melakukan rapat rutin Komite Audit untuk membahas Laporan Hasil Audit Umum.
b. Melakukan rapat Komite Audit dengan Auditor Indenden/KAP.
c. Melakukan rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
d. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
e. Melakukan rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
f. Melakukan pembahasan laporan keuangan dan laporan realisasi Rencana Bisnis Bank serta laporan kinerja Bank.
g. Membuat laporan tahunan Komite Audit.

Aktivitas Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2016 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran–saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh Bank di dalam 26 (dua puluh enam) kali rapat/pertemuan.

Rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit secara internal sebanyak 25 (dua puluh lima) kali rapat/pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	08 Januari 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Siak Sri Indrapura periode Audit 1 Mei 2014 s.d. 1 Oktober 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R.Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
2	18 Januari 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit	1. H.R.Mambang Mit

		Umum Kantor Cabang Air Molek periode Audit 1 Juli 2014 s.d. 30 Oktober 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	2. Sarjono Amnan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	01 Februari 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Utama periode Audit 1 Agustus 2014 s.d. 31 Oktober 2015 2. Membahas Laporan SKAI mengenai Tindak Lanjut Audit Umum Perkreditan, Audit Umum Operasional dan IT dan Audit Umum posisi Desember 2015	1. H.R.Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
4	05 Februari 2016	1. Membahas Laporan SKAI tentang Laporan Hasil Audit Umum Divisi Produk dan Jasa periode Audit 1 Maret 2012 s.d. 30 November 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R.Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
5	22 Februari 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri per 31 Desember 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R.Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
6	18 Maret 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri/ *Quick Monthly Report* bulan Januari 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R.Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
7	23 Maret 2016	1. Membahas Laporan Review Ekstern SKAI tahun 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R.Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
8	28 Maret 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Februari 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R.Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
9	01 April 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Syariah periode Audit 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
10	04 April 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Ranai periode Audit 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
11	15 April 2016	1. Membahas Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pemeriksaan tahun buku Bank Riau Kepri tahun 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
12	19 April 2016	1. Membahas Laporan Hasil Audit Umum Cabang Batam periode Audit 1 Mei 2014 s.d. 31 Oktober 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
13	04 Mei 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Maret 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
14	23 Mei 2016	1. Membahas Laporan Penggunaan Dana bulan April 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
15	30 Mei 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan April 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
16	22 Juni 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri	1. Sarjono Amnan

		bulan Mei 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
17	11 Juli 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Pasir Pangaraian per April 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
18	15 Agustus 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri sampai dengan 30 Juni 2016 2. Membahas Laporan Divisi Perencanaan Strategis Mengenai Realisasi Rencana Bisinis Bank periode Triwulan II 2016 3. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R.Mambang Mit 3. Indarti
19	26 September 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri/ *Quick Monthly Report* bulan Agustus 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
20	17 Oktober 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Agustus 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
21	01 November 2016	1. Membahas tentang hasil pengajuan proposal penawaran dari Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai penawaran biaya pengadaan jasa audit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
22	08 November 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan September 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
23	09 November 2016	1. Membahas Laporan Hasil Audit Penggunaan Teknologi Informasi 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
24	21 November 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Bengkalis dan Jaringan Kantor di bawahnya 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
25	01 Desember 2016	1. Membahas Laporan Hasil Audit Umum Cabang Air Molek periode 01 November 2015 s/d 01 Juli 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

Untuk rapat koordinasi Komite Audit dengan unit kerja Bank lainnya dan pihak eksternal (KAP) telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali rapat/pembahasan, yaitu sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE AUDIT			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	26 Oktober 2016	1. Membahas tentang hasil presentasi Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai penawaran biaya pengadaan jasa audit Laporan Keuangan Bank untuk tahun	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R.Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

		buku 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	5. Direktur Utama 6. Pemimpin Divisi Kepatuhan 7. Pemimpin SKAI

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Audit baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran Pada :			(%) Kehadiran
	Rapat Internal Komite	Rapat Koordinasi	Total Jumlah Kehadiran	
Sarjono Amnan	18	-	18	100%
A. Rivaie Rachman	7	1	8	100%
H. R. Mambang Mit	25	1	26	100%
Fahmi Oemar	24	1	25	96%
Indarti	25	1	26	100%

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komposisi Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko dibentuk bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, serta memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Untuk komposisi Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK Direksi No. 19/KEPDIR/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, komposisi Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana dari tabel berikut ini :

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Berdasarkan SK Direksi No. 19/KEPDIR/2016		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Sarjono Amnan	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

2. Dengan berakhirnya masa jabatan ketua merangkap anggota komite yaitu Sarjono Amnan sebagai Komisaris Bank per 31 Agustus 2016, maka ketua Komite Pemantau Risiko (merangkap anggota) selanjutnya dijabat oleh Mambang Mit yang ditetapkan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko per September 2016 berdasarkan SK Direksi No. 59/KEPDIR/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 19/KEPDIR/2016 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, sehingga komposisi Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Berdasarkan SK Direksi No. 59/KEPDIR/2016		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
Mambang Mit	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Utama
A. Rivaie Rachman	Anggota	Komisaris Independen
Fahmi Oemar	Anggota	Pihak Independen
Indarti	Anggota	Pihak Independen

Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari Komisaris Independen dan pihak Independen. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Seluruh keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu–isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah–langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri adalah :

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan tidak terbatas pada laporan pemeriksaan SKAI dan Direktur Kepatuhan.

Rencana dan Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

1. Rencana Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Untuk tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas mengenai informasi-informasi yang terkait dengan profil risiko diluar dari laporan reguler dari Divisi Manajemen Risiko.

b. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas laporan profil risiko Bank atau materi lain yang dipandang perlu.

c. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Bank.

d. Melakukan kunjungan pengawasan Pemantau Risiko ke Kantor Cabang (bila diperlukan).

e. Melaksanakan rapat lainnya yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

f. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

2. Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2016 kegiatan yang telah direalisasikan oleh Komite Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas mengenai informasi-informasi yang terkait dengan profil risiko diluar dari laporan reguler dari Divisi Manajemen Risiko.

b. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas laporan profil risiko Bank atau materi lain yang dipandang perlu.

c. Menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko untuk membahas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Bank.

d. Melaksanakan rapat lainnya yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

e. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Aktivitas Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut di atas, sepanjang tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat/pertemuan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	29 Januari 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Air Molek periode Audit 1 Juli 2014 s.d. 30 Oktober 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

2	03 Februari 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Utama periode Audit 1 Agustus 2014 s.d. 31 Oktober 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	04 Februari 2016	1. Membahas Laporan SKAI tentang Laporan Hasil Audit Umum Divisi Produk dan Jasa periode Audit 1 Maret 2012 s.d. 30 November 2015 2. Membahas Potensi Risiko dari Aktivitas Bank dan Upaya yang Dilakukan untuk Memitigasi Risiko 3. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H. R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
4	17 Maret 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri/ *Quick Monthly Report* bulan Januari 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H. R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
5	06 April 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri per 29 Februari 2016 2. Monitoring *Risk Appetite Statement* bulan Februari 2016 3. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H. R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
6	12 April 2016	1. Membahas Laporan SKAI mengenai Audit Umum Kantor Cabang Tembilahan per 31 Januari 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H. R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
7	09 Mei 2016	1. Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri per 31 Maret 2016 2. Membahas Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Bank 3. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H. R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
8	13 Juni 2016	1. Membahas tentang Laporan Bulanan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Perkembangan Kinerja dan Keuangan PT. Bank Riau Kepri bulan April 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H. R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
9	18 Juli 2016	1. Membahas tentang Laporan Bulanan Direksi kepada Dewan Komisaris bulan Mei 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H. R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
10	18 Agustus 2016	1. Membahas Laporan Divisi Perencanaan Strategis mengenai Realisasi Rencana Bisnis Bank periode 30 Juni 2016 Triwulan II tahun 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H. R. Mambang Mit 3. Indarti
11	22 September 2016	1. Membahas tentang Laporan Kinerja Bank Riau Kepri/ *Quick Monthly Report* bulan Agustus 2016 2. Membahas potensi risiko dan upaya yang perlu dilakukan untuk memitigasi potensi risiko tersebut 3. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H. R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
12	15 November 2016	1. Membahas Laporan Hasil Audit Penggunaan Teknologi Informasi 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H. R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
13	05 Desember 2016	Membahas Laporan Hasil Audit Umum Cabang Air Molek periode 01 November 2015 s/d 01 Juli 2016	1. H. R. Mambang Mit 2. A. Rivaie Rachman 3. Indarti

Untuk rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan unit kerja Bank lainnya telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali rapat/pembahasan, sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	12 Januari 2016	1. Membahas tentang *Stress Testing* Likuiditas untuk periode 11 Januari 2016 s.d. 29 Januari 2016. 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Divisi Manajemen Risiko
2	26 Januari 2016	1. Membahas tentang Penilaian Kesehatan Bank periode Desember 2015 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 6. Divisi Manajemen Risiko 7. Divisi Kepatuhan
3	01 Maret 2016	1. Membahas tentang Laporan Monitoring *Risk Appetite Statement* PT. Bank Riau Kepri 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. Sarjono Amnan 2. H.R. Mambang Mit 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Divisi Manajemen Risiko

Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	**Jumlah Kehadiran Pada :**			**% Kehadiran**
	Rapat Internal Komite	**Rapat Koordinasi**	**Total Jumlah Kehadiran**	
Sarjono Amnan	10	3	13	100 %
H. R. Mambang Mit	13	3	16	100 %
A. Rivaie Rachman	3	-	3	100 %
Fahmi Oemar	11	3	14	88 %
Indarti	13	3	16	100 %

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari Komisaris independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia). Untuk anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia) memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank, dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko Bank.

Pada tahun 2016 terdapat beberapa kali perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi. Perubahan terjadi karena adanya pergantian anggota komite yaitu pergantian Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia).

Untuk komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Remunerasi dan Nominasi		
Nama	**Jabatan**	**Keterangan**
A. Rivaie Rachman	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen
Mambang Mit	Anggota	Komisaris Utama
Denny M. Akbar*	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Tengkoe Irawan**	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Yuharman***	Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

* ***Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi s.d. Februari 2016***
** ***Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Maret s.d. September 2016***
*** ***Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per Oktober 2016***

Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, integritas dan moral yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam Buku Pedoman Perusahaan *Good Corporate Governance* Bank Riau Kepri dan peraturan/ketentuan terkait lainnya.

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Terkait dengan bidang remunerasi :
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
      - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
   c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
      - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
      - Prestasi kerja individual
      - Kewajaran dengan *peer group*
      - Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank
2. Terkait dengan bidang nominasi :
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Rencana dan Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Rencana Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun rencana kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu sebagai berikut :

a. Mereview kebijakan remunerasi Dewan Komisaris/Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
b. Menyusun nominasi dalam rangka kaderisasi calon pengurus Bank Riau Kepri.
c. Menyusun rekomendasi calon Komisaris dan calon Direksi Bank untuk disampaikan kepada RUPS.
d. Mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris.
e. Mengadakan rapat dengan Direksi.

2. Realisasi Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2016 program kerja yang telah dilaksanakan/direalisasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain sebagai berikut :

a. Menyusun nominasi pejabat-pejabat eksekutif dalam rangka kaderisasi calon pengurus Bank Riau Kepri.

b. Menyusun rekomendasi calon Komisaris dan calon Direksi Bank untuk disampaikan kepada RUPS.

c. Mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris.

d. Mengadakan rapat dengan Direksi.

Aktivitas Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

Sesuai ketentuan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Sepanjang tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi Bank telah melakukan pembahasan dalam bentuk pertemuan/rapat sebanyak 8 (delapan) kali rapat/pertemuan, dengan rincian sebagai berikut :

AKTIVITAS RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI			
No	**Tanggal**	**Materi Rapat**	**Peserta**
1	05 Januari 2016	Membahas Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Denny M. Akbar
2	02 Februari 2016	Membahas Hasil RUPSLB tanggal 28 Januari 2016	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Denny M. Akbar
3	21 April 2016	Membahas Nominasi Pejabat-pejabat Eksekutif PT. Bank Riau Kepri dalam Rangka Kaderisasi dan Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. H.R. Mambang Mit 2. Sarjono Amnan 3. Irvandi Gustari 4. Tengkoe Irawan
4	16 Mei 2016	1. Membahas Rekomendasi Calon-calon Komisaris PT. Bank Riau Kepri Hasil Keputusan RUPS-LB Januari 2016 2. Membahas Rekomendasi Calon-calon Komisaris PT. Bank Riau Kepri periode 2016 3. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	1. A. Rivaie Rachman 2. H.R. Mambang Mit 3. Tengkoe Irawan
5	16 Mei 2016	Membahas Usulan Remunerasi Pengurus PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H. R. Mambang Mit 3. Tengkoe Irawan
6	26 Juli 2016	1. Membahas tindak lanjut Hasil Keputusan	1. A. Rivaie Rachman

		RUPSLB 31 Mei 2016 2. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu	2. H. R. Mambang Mit 3. Sarjono Amnan 4. Tengkoe Irawan
7	06 September 2016	1. Membahas tentang Progres Akhir Pencalonan Komisaris 2. Membahas tentang Progres Akhir Pencalonan Direksi 3. Penggantian Ketua dan Anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H. R. Mambang Mit 3. Tengkoe Irawan
8	24 November 2016	Membahas hasil *Fit and Proper Test* Calon Komisaris dan Hasil Tim Seleksi Calon Direksi PT. Bank Riau Kepri	1. A. Rivaie Rachman 2. H. R. Mambang Mit 3. Yuharman

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dan segala keputusan rapat komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota komite.

Hasil keputusan rapat komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi baik secara internal maupun rapat koordinasi, adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
A. Rivaie Rachman	**7**	**88 %**
H. R. Mambang Mit	**8**	**100 %**
Denny M. Akbar	**3**	**100 %**
Tengkoe Irawan	**5**	**100 %**
Yuharman	**1**	**100 %**

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF YANG DIMILIKI OLEH BANK

Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Direksi telah membentuk komite eksekutif yang berfungsi membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya, yang terdiri dari : Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Kredit, Komite Anti *Fraud* dan Komite Sumber Daya Manusia.

1. Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 06/KEPDIR/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi PT. Bank Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Komite Teknologi Informasi	
Direktur Utama	Ketua
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Anggota
Direktur Operasional	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Direktur Dana & Jasa	Anggota
Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Anggota
Pemimpin Divisi Operasional dan Keuangan	Anggota
Pemimpin Divisi Produk, Dana dan Jasa	Anggota
Pemimpin Divisi Umum	Anggota
Pemimpin Divisi Human Capital	Anggota

Tugas dan Tanggung Jawab

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup :

a. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.

b. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi.

c. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi dan menetapkan status prioritas Teknologi Informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank).

d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati di dalam *Service Level Agreement*, melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.

e. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.

f. Efektifitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi dan investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.

g. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.

h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.

i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2016 Komite Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini :

RAPAT KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2016	
Tanggal	Agenda
Rabu, 18 Mei 2016	1. Pembenahan Infrastruktur IT terkait *Security* 2. Performa Mesin AS400 3. *Colocation Data Center* Eks Kantor Pusat ke *Data Center* milik XL

2. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (RMCO) dibentuk bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 50A/KEPDIR/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Komite Manajemen Risiko.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko di Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO	
Ketua I	Direktur Utama
Ketua II	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Direktur Operasional
	Direktur Dana dan Jasa
	Direktur Kredit dan Syariah
	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer Mikro
	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
	Pemimpin Divisi Produk & Jasa
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

Misi, Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki Misi, Tugas dan Tanggung jawab sebagai berikut :

a. Misi

Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Sehingga, Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank yang senantiasa tidak lepas dari risiko.

b. Tugas dan Tanggung jawab

- Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko yang efektif di Bank Riau Kepri.
- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan *eksposure* risiko.
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia yang menyangkut penerapan manajemen risiko.
- Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
- Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/ dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Menjalankan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2016 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini :

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2016	
Tanggal	**Agenda**
25 Januari 2016	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2015
28 Juli 2016	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank periode Juni 2016
28 Desember 2016	Pembahasan *Risk Appetite Statement* tahun 2017

3. Komite Pembiayaan

Bank telah membentuk Komite Pembiayaan yang bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan. Pembentukan Komite Pembiayaan ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 90/KEPDIR/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Susunan dan Tata Tertib Komite Pembiayaan PT. Bank Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Pembiayaan Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE PEMBIAYAAN	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kredit dan Syariah
Sekretaris (merangkap anggota)	Pemimpin Divisi Syariah
Anggota	Direktur Dana dan Jasa
	Pemimpin Divisi Komersial
	Pinbag. Pemasaran dan Pengembangan Bisnis – Divisi Syariah
Supporting	Staf Bagian Pemasaran Divisi Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain sebagai berikut :

a. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

b. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.

c. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

d. Jika diperlukan komite pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan pembiayaan.

4. Komite ALCO

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan *asset* dan *liability*, Bank Riau Kepri telah memiliki Komite ALCO yang tertuang di dalam Keputusan Direksi tentang *Asset Liability Management* PT. Bank Riau Kepri.

Saat ini ketentuan mengenai Komite ALCO diatur di dalam Keputusan Direksi No. 25/KEPDIR/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Direksi No. 54/KEPDIR/2004 tentang *Asset Liability Management* PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite ALCO Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE ALCO	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap Ketua Pengganti	Direktur Dana dan Jasa
Wakil Ketua	Direktur Kredit dan Syariah
	Direktur Operasional
Sekretaris	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
Anggota	Pemimpin Divisi Komersial
	Pemimpin Divisi Konsumer
	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
	Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa
	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
	Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah melakukan pengelolaan *Asset* dan *Liabilities Management* (ALMA) yang meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management*, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi

Bank Riau Kepri dengan menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate/prime landing rate* dan menetapkan *internal fund transfer price.*

Rapat Komite ALCO

Sepanjang tahun 2016, Komite ALCO telah menyelenggarakan 10 kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut :

RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2016	
Tanggal	**Agenda**
25 Januari 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Januari 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Januari 2016 3. Membahas dampak dari PMK No. 235/PMK.07/2015 terhadap DPK Pemda 4. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
23 Maret 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Maret 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Maret 2016 3. Menetapkan Keputusan Direksi penentuan *special rate* Deposito 4. Menetapkan komposisi persentase biaya surat berharga hanya untuk kredit konsumtif sesuai saran BPK 5. Meminta kepada Divisi Manajemen Risiko untuk membuat model perhitungan estimasi premi risiko terkait perhitungan SBDK sesuai saran BPK 6. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
21 April 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) April 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) April 2016 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
27 Mei 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Mei 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Mei 2016 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
30 Juni 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Juni 2015 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juni 2015 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
27 Juli 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Juli 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Juli 2016 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
30 Agustus 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Agustus 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Agustus 2016 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
06 September 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) September 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) September 2016

	3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
05 Oktober 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Oktober 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Oktober 2016 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
05 November 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) November 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) November 2016 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO
28 Desember 2016	1. Menetapkan *Base Lending Rate* (BLR) Desember 2016 2. Menetapkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Desember 2016 3. Hal lainnya yang diusulkan oleh anggota ALCO

5. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan sektor yang sangat strategis di setiap usaha keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam. Setelah itu, harus diimplementasikan secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat.

Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 62/KEPDIR/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Komite Kebijakan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Kredit dan Syariah
Wakil Ketua	Direktur Operasional
Sekretaris I	Pemimpin Divisi Komersial
Sekretaris II	Pemimpin Divisi Konsumer
Sekretaris III	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
Anggota	Pemimpin Divisi Syariah
	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
	Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan, meliputi sebagai berikut :

a. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.

b. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.

c. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.

d. Memantau dan mengevaluasi :

   1) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;

   2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;

   3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;

   4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;

   5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;

   6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan

   7) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan, adalah sebagai berikut :

a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai :

   1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB;

   2) Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.

b. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

6. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia Bank diatur di dalam BPP Kepegawaian Bank Riau Kepri Bab IV Masa Orientasi, Penempatan dan Mutasi, poin 4.8 Komite Sumber Daya Manusia dan Tim Mutasi Tenaga Pimpinan.

Susunan Keanggotaan

Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia	
Direktur Utama	Ketua (merangkap Anggota)
Direktur Operasional	Anggota
Direktur Kredit & Syariah	Anggota
Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia	Sekretaris

Tugas Umum dan Tanggung Jawab Utama Komite SDM, meliputi :

a. Perencanaan dan penerimaan Pegawai :
   - Mempertimbangkan dan menyetujui prakiraan Pegawai
   - Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
   - Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDM secara keseluruhan
   - Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)

b. Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.

c. Manajemen Jalur Karir
   - Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
   - Menentukan Program Jalur Karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
   - Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir

d. Manajemen Imbalan
   - Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (*employee benefits*);
   - Menyetujui pedoman cara-cara penggajian dan pemberian imbalan lainnya

7. Komite Kredit

Bank memiliki Komite Kredit yang bertugas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan kredit sebagai bahan pertimbangan bagi Direktur Utama dalam mengambil keputusan.

Komite Kredit Bank Riau Kepri dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi No. 40/KEPDIR/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Susunan dan Tata Tertib Komite Kredit PT. Bank Riau Kepri.

Namun sejak September 2016, berdasarkan Keputusan Direksi No. 58/KEPDIR/2016 tanggal 14 September 2016 tentang Kebijakan Perkreditan Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Komite Kredit ditiadakan dan diganti dengan Rapat Direksi (Radisi).

Rapat Direksi (Radisi) merupakan rapat anggota Direksi yang memutus kredit di atas plafon tertentu yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Direksi tersendiri.

Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan Komite Kredit Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE KREDIT	
Ketua merangkap Anggota	Direktur Kredit dan Syariah
Anggota merangkap Sekretaris	Pemimpin Divisi Komersial
Anggota	Direktur Dana & Jasa
	Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro
	Pemimpin Bagian Komersial
Supporting	Staf Divisi Komersial

Sedangkan susunan keanggotaan Radisi adalah semua Direksi kecuali Direktur Kepatuhan.

Tugas Komite Kredit

Secara umum Komite Kredit bertugas :

a. Membahas permohonan kredit nasabah di atas plafond tertentu yang diusulkan kantor Cabang dan permohonan kredit sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

b. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan kredit sebagai bahan pertimbangan keputusan Direktur Utama.

c. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan kredit dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

d. Jika diperlukan Komite Kredit dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan perkreditan.

e. Untuk supporting, secara umum bertugas :

   - Membuat undangan dan mendistribusikannya kepada masing-masing anggota Komite Kredit.
   - Mendistribusikan copy analisis kredit yang telah didisposisi pejabat yang berwenang.
   - Menyiapkan notulen rapat dan berita acara rapat komite kredit serta meminta kepada seluruh peserta rapat yang hadir untuk menandatangani hasil rapat tersebut dan selanjutnya meneruskan berita acara rapat kepada Direktur Utama untuk diputuskan.

Rapat Komite Kredit

Sepanjang tahun 2016 (s.d. Juli 2016), Komite Kredit telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut :

RAPAT KOMITE KREDIT TAHUN 2016	
Tanggal	**Agenda**
22 Februari 2016	Rapat Pembahasan Permohonan Kredit Karya Prima Transaksional an. PT. Budi Jaya General.
23 Mei 2016	Rapat Pembahasan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Niaga Prima *Revolving* an. PT. Rantau Bais Sawit Family.
10 Juni 2016	Rapat Pembahasan Permohonan Bank Garansi Pelaksanaan an. PT. Berkat Yakin Gemilang.
10 Juni 2016	Rapat Pembahasan Permohonan Bank Garansi Pelaksanaan an. PT. Bina Riau Sejahtera - PT. Berkat Yakin Gemilang KSO.
30 Juni 2016	Rapat Pembahasan Permohonan Perpanjangan Kredit Karya Prima Standby Plafond an. PT. Bina Riau Sejahtera.
30 Juni 2016	Rapat Pembahasan Permohonan Kredit Karya Prima Transaksional an. PT. Tisa Lestari.
29 Juli 2016	Rapat Pembahasan Permohonan Kredit Karya Prima Standby Plafond an. PT. Hasrat Tata Jaya.

Rapat Direksi (Radisi)

Sepanjang tahun 2016 (sejak September 2016), telah diselenggarakan 2 (dua) kali Rapat Direksi (Radisi), dengan rincian sebagai berikut :

RAPAT DIREKSI (RADISI) TAHUN 2016	
Tanggal	**Agenda**
21 September 2016	Rapat Pembahasan Permohonan Kredit Modal Kerja Atas Dasar Kontrak Sublimit Usance L/C an. PT. Ady Putra Prima Kencana.
04 Oktober 2016	Rapat Pembahasan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja Atas Dasar Kontrak – Standby Plafond an. PT. Riau Bumi Bina Makmur.

8. Komite Anti *Fraud*

Susunan Keanggotaan

Komite Anti *Fraud* dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 85/KEPDIR/2014 tanggal 02 Desember 2014, dengan komposisi keanggotaannya adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTANKOMITE ANTI *FRAUD*	
Ketua	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Sekretaris	Pemimpin Bagian Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Divisi Manajemen Risiko
Anggota	Pemimpin SKAI
	Pemimpin Divisi Hukum
	Pemimpin Divisi Kepatuhan
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Anti *Fraud* memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi dan pembelajaran secara periodik terhadap seluruh pegawai terkait kebijakan, prosedur dan penerapan strategi anti *fraud* yang ditetapkan Bank.

b. Mengkoordinasikan peningkatan pemahaman pegawai mengenai *fraud* seperti bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.

c. Mengkoordinasikan peningkatan kepedulian dan kewaspadaan nasabah terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

d. Menetapkan metode penilaian dan pengukuran terhadap kejadian *fraud* termasuk proses monitoring dan kontrol serta pengelolaan *database* untuk setiap kejadian *fraud*, baik yang sudah terjadi maupun dalam usaha percobaan namun tidak terealisasi.

e. Mengkoordinir pelaksanaan identifikasi kerawanan dengan melakukan identifikasi, analisis dan menilai potensi terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas Bank.

f. Mendokumentasikan dan menginformasikan hasil identifikasi kerawanan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.

g. Mengkoordinasikan penerapan *Whistleblowing System*.

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan *Surprise Audit* dan *Surveillance System*.

i. Mengkoordinasikan evaluasi data kejadian.

j. Mengkoordinasikan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan atas kejadian-kejadian *fraud*.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan Bank saat ini diatur di dalam kebijakan Direksi mengenai Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana termuat di dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 56/KEPDIR/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest)*. Di dalam kebijakan tersebut diatur mengenai bentuk-bentuk benturan kepentingan, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan serta sanksi jika terjadi benturan kepentingan.

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan sepanjang tahun 2016.

PENERAPAN FUNGSI DAN BUDAYA KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat menjadi tolok ukur atas penilaian nasabah dan pemegang saham terhadap kinerja Bank.

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sedangkan Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Riau Kepri telah menyusun dan memberlakukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 67/KEPDIR/2012 tanggal 31 Desember 2012. BPP Kepatuhan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang nantinya diharapkan akan menjadi lebih *forward looking* dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan pada kegiatan usaha Bank.

Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diatur sebagai berikut :

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah, serta

memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan, meliputi antara lain :

   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.

   b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

   d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.

   e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.

   f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

   h. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

   i. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU dan PPT) seluruh operasional Bank, dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan.

   Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

3. Direktur Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:

   a. bisnis dan operasional;

   b. manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;

   c. treasury;

   d. keuangan dan akuntansi;

   e. logistik dan pengadaan barang/jasa;

   f. teknologi informasi; dan

   g. audit intern/SKAI.

4. Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi :

a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis Bank;

b. Laporan kepatuhan; dan

c. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurutnya telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari tugas Direktur Kepatuhan.

Laporan sebagaimana dimaksud di atas wajib ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan, dan disampaikan kepada OJK secara semesteran dan diterima OJK paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
   a. Menyusun *Compliance Charter* (piagam kepatuhan)
   b. Menyusun *Compliance Code of Conduct* (kode etik kepatuhan)
   c. Menyusun *Compliance Policy* (kebijakan kepatuhan).
2. Melakukan sosialisasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri.
3. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan dan *Whistle Blowing System.*
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman APU & PPT serta pedoman GCG.
5. Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
6. Memantau tindaklanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.
7. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance.*
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan rencana kerja Kepatuhan yang dimuat di dalam laporan Rencana Bisnis Bank (RBB).
10. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Terkait dengan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, Bank telah melaporkan kepada OJK, antara lain sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN KETENTUAN KEHATI-HATIAN BANK		
Jenis Laporan	**Penilaian Pada Periode Laporan**	
	Juni 2016	**Desember 2016**
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20,00 %	18,21 %
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	0,14 %	0,12 %
Kredit Kualitas Rendah	7,56 %	6,45 %
Non Performing Loan (NPL) Gross	4,68 %	4,16 %
Non Performing Loan (NPL) Netto	0,14 %	0,07 %
Tingkat Kesehatan Bank	3 (Cukup Sehat)	2 (Sehat)

Langkah-langkah yang telah ditempuh dan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di atas masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait pemahaman dan disiplin karyawan terhadap ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal dan sistem kontrol atas implementasi terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip *Good Corporate Governance* dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Unit Kerja Di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan memiliki 3 (tiga) unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur Kepatuhan Bank. Unit kerja yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum. Pembentukan unit kerja tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Hukum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Divisi Kepatuhan

a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

b. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.

e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2. Divisi Manajemen Risiko

a. Mengelola kebijakan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya.

b. Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMCO dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya.

c. Mengembangkan metode dan modul pengukuran risiko.

d. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR).

e. Mengembangkan perangkat aplikasi pengukuran dan pengendalian risiko.

f. Melakukan kajian risiko atas usulan produk atau aktivitas baru serta mendukung/memberikan solusi untuk percepatan target kinerja unit bisnis dan unit kerja terkait lainnya.

g. Melakukan pengukuran, analisa risiko kredit, pemantauan dan pengendalian, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.

h. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional dan atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO).

i. Meningkatkan kompetensi pengurus dan pejabat Bank dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko.

3. Divisi Hukum

a. Bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum yang dihadapi oleh Bank, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

b. Bertanggungjawab dalam hal membuat perjanjian/perikatan antara Bank dengan pihak ketiga dan kegiatan dibidang hukum lainnya.

c. Memberikan bantuan *advis*/saran hukum menyangkut permasalahan hukum yang terjadi di Bank.

Sistem Kepatuhan

Sistem Kepatuhan Bank dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku, meliputi :

1. Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*)

   Dimaksudkan untuk membangun *awareness* segenap jajaran Bank terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

2. Pengujian Kepatuhan (*Compliance Review*), meliputi :

   a. Pengujian Kebijakan

      Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, dan ketentuan eksternal lainnya.

   b. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan

      Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.

   c. Pengujian Permasalahan Operasional Bank

      Adalah pengujian terhadap permasalahan-permasalahan operasional Bank pada setiap satuan kerja, meliputi permasalahan sebagai berikut :

      - Belum ada peraturan internal yang mengatur, sehinga satuan kerja perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan BI/OJK dan ketentuan yang berlaku.
      - Kebijakan yang akan diambil telah diatur di dalam ketentuan internal, namun perlu penafsiran/penjelasan lebih lanjut.

Kegiatan Unit Kerja Kepatuhan

Sesuai dengan SOT Bank Riau Kepri, struktur Satuan Kerja Kepatuhan (Divisi Kepatuhan) memiliki 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan Bagian Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). Sepanjang tahun 2016 Divisi Kepatuhan telah melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya namun tidak terbatas pada :

1. Melakukan pengkajian Rencana Keputusan dan Rancangan Kebijakan Bank.
2. Melakukan pengkajian dan pengujian kepatuhan terhadap produk dan jasa Bank.
3. Memastikan bahwa tidak terjadi denda akibat keterlambatan Laporan pada Bank Indonesia/OJK.
4. Melakukan monitoring terhadap temuan Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan GCG tahun 2015 kepada pihak-pihak terkait.
6. Menyusun dan menerbitkan beberapa kebijakan Bank yaitu sebagai berikut :
   a. SK Direksi No. 33/KEPDIR/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
   b. SK Direksi No. 85/KEPDIR/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
   c. SE Direksi No. 38/SE/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Aplikasi Monitoring Komitmen (*A-Moment)* PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
7. Melakukan sosialisasi dan komunikasi ke seluruh jajaran Pegawai Bank Riau Kepri mengenai GCG, Budaya kepatuhan dan Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) serta *Whistleblowing System* .
8. Menyampaikan laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) kepada PPATK secara *online* melalui Aplikasi GRIPS sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
9. Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Divisi Kepatuhan sepanjang tahun 2016 telah menyusun dan menerbitkan :
   a. Surat Keputusan Direksi No. 34/KEPDIR/2016 tanggal 02 Juni 2016 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
   b. Surat Keputusan Direksi No. 53/KEPDIR/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Aplikasi Program Penetapan Kantor Cabang Dengan Kompleksitas Usaha Tinggi.
   c. Surat Keputusan Direksi No. 54/KEPDIR/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Aplikasi Program *Politically Exposed Person* (PEP).
   d. Surat Keputusan Direksi No. 52/KEPDIR/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Aplikasi Program Monitoring Daftar Teroris, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
   e. Surat Keputusan Direksi No. 69/KEPDIR/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tantang Aplikasi Monitoring Transaksi Pegawai.
   f. Surat Keputusan Direksi No. 99/KEPDIR/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Aplikasi Monitoring *Customer Identification File* (CIF) Ganda.
   g. Surat Edaran Direksi No. 34/SE/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Sistem Pemantauan *Politically Exposed Person* (PEP).
   h. Surat Edaran Direksi No. 32/SE/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Aplikasi Program Monitoring Daftar Teroris, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.
10. Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan pengkinian data Nasabah dan *progress* kegiatan *single* CIF ke beberapa jaringan kantor cabang Bank.
11. Memberikan pelatihan APU & PPT termasuk penerapan GCG Bank secara berkala kepada petugas *frontliner (customer service* dan *teller*) baru dan *refresh* serta kepada

Pemimpin Seksi Pelayanan Cabang, Pemimpin Seksi Operasional Capem dan Pemimpin Kedai (baru & *refresh*).

12. Mengikutsertakan pegawai Divisi Kepatuhan, Pemimpin Seksi Pelayanan Cabang, Pemimpin Seksi Operasional Cabang Pembantu dan Pemimpin Kedai, *Customer Service*, serta pegawai dari unit kerja SKAI dan Divisi Treasury & Internasional, pada *Public Training* yang diselenggarakan oleh FKDKP bekerjasama dengan PPATK, KPK dan OJK.
13. Untuk mendukung pelaporan ke PPATK, dilakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pendukung yang telah ada, sehingga dapat menyajikan CIF nasabah baru pada periode tertentu.
14. Melakukan penyempurnaan infrastruktur terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan terhadap calon nasabah dan nasabah Bank.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

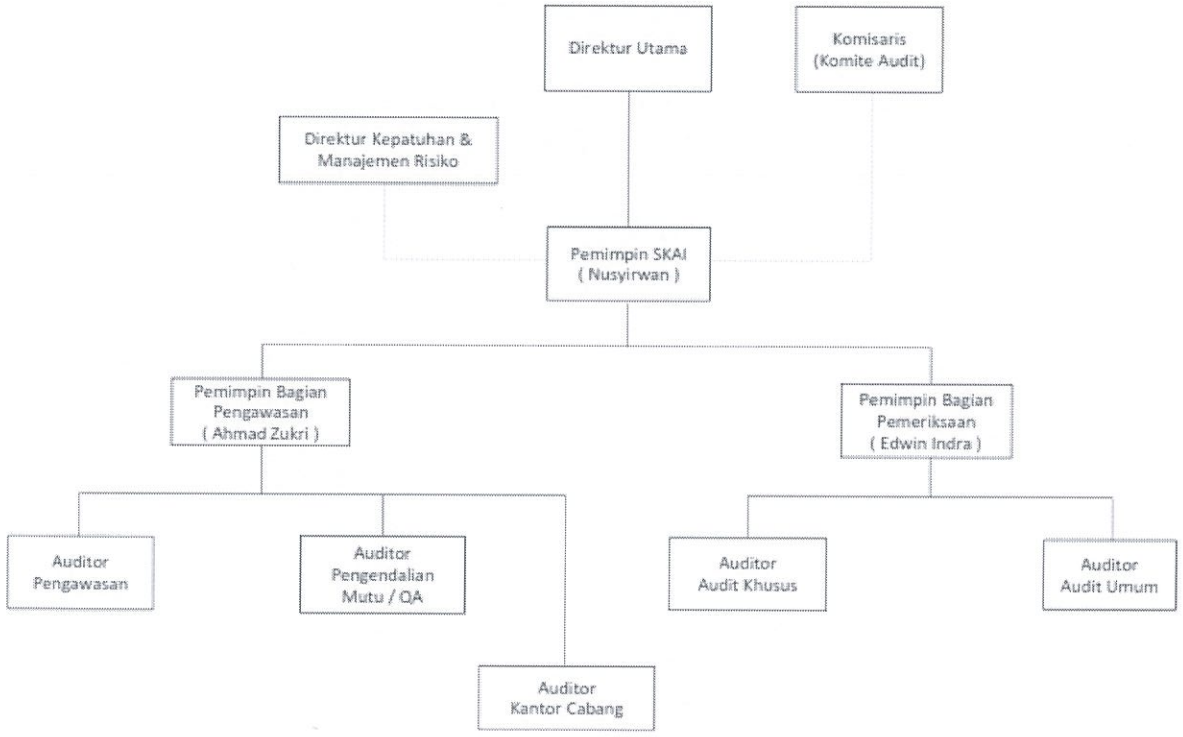
Di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1/6/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan *(Compliance Director)* dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), ditetapkan bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern Bank, untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, SKAI harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional Bank, sejak awal Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja yang menjalankan fungsi audit intern untuk memastikan bahwa struktur pengendalian intern yang ada pada Bank telah berjalan sebagaimana mestinya.

Susunan Organisasi dan Panduan Kerja Audit Intern

Berdasarkan SK Direksi No. 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, ditegaskan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin oleh seorang Pemimpin SKAI setingkat Pemimpin Divisi, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. SKAI memiliki 2 (dua) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Pengawasan dan Bagian Pemeriksaan.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)
PT. BANK RIAU KEPRI



Dalam melakukan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)* dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengawasan Berbasis Risiko yang tertuang di dalam SK Direksi Bank Nomor 63/KEPDIR/2006 tanggal 29 Agustus 2006 berikut perubahan-perubahannya, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagai standar yang memuat ukuran minimal tentang Fungsi Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh Bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern tersebut.

Persyaratan Auditor Internal

Auditor Internal Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 56A/KEPDIR/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Persyaratan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Wajib memiliki standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional.
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan SK Direksi No. 66/KEPDIR/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, *Internal Audit Charter* dan BPP Pengawasan Berbasis Risiko, Satuan Kerja Audit Intern melakukan tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja/strategi bisnis Satuan Kerja Audit Intern dan unit kerja di bawah supervisi dalam bentuk KPI *(Key Performance Indicator)*
2. Menyusun anggaran *(budget)* tahunan dan melakukan monitoring/pengendalian atas pelaksanaannya.
3. Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan secara aktif (*on-site)* dan pemantauan secara pasif *(off-site*) serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.
4. Memberikan penilaian terhadap sistem pengendalian intern dan prosedur yang ada pada seluruh aspek kegiatan Bank untuk memperoleh keyakinan tercapainya tujuan dan sasaran Bank secara optimal.

5. Melaksanakan proses kegiatan audit secara profesional dan independen dan proaktif serta kontinyu sesuai dengan *internal audit charter* dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Risk Based Audit* dan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan audit terhadap hal-hal di luar rencana kerja, baik itu atas permintaan internal maupun eksternal yang berwenang sesuai persetujuan Direksi.
7. Melakukan koordinasi tugas dan mendampingi pemeriksaan eksternal dalam rangka kelancaran pemeriksaan.
8. Me-*review* semua kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi audit intern dalam melakukan tugasnya.
9. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank Riau Kepri untuk memberikan nilai tambah (*value added*) sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas SKAI.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*)

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Bank ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 56A/KEPDIR/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Satuan Kerja Audit Intern
2. Tujuan Satuan Kerja Audit Intern
3. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern
4. Independensi dan Obyektivitas Satuan Kerja Audit Intern
5. Persyaratan Auditor Internal
6. Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Intern
7. Wewenang Satuan Kerja Audit Intern
8. Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern
9. Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mendukung efektivitas internal audit
10. Tanggung jawab Direksi dalam mendukung efektivitas internal audit
11. Lain-Lain

Laporan Kegiatan Audit Internal

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern tahun 2016 yang telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, SKAI telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2016 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Audit Umum (*on site*) terhadap 19 (sembilan belas) kantor cabang Bank.

2. Membuat Laporan *Quality Assurance* terhadap 18 (delapan belas) kantor cabang Bank dan Laporan Hasil Audit Umum terhadap 5 (lima) Divisi.
3. Melakukan *review* terhadap BPP *Risk Based Audit* :
   a. Buku 1A – Organisasi *Risk Based Audit*
   b. Buku 1B – Pedoman Umum
   c. Buku 2A – Pedoman Pelaksanaan Audit Umum
   d. Buku 2B – Pedoman Pelaksanaan Audit Internal Kontrol Cabang
   e. Buku 2C – Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Teknologi dan Sistem Informasi
   f. Buku 2D – Pedoman Pelaksanaan Audit Khusus
   g. Buku 3A – Audit Program Umum
   h. Buku 3B – Audit Program Auditor Cabang
4. Melakukan *review* ekstern SKAI oleh pihak konsultan.
5. Melakukan kaji ulang terhadap penghitungan ICAAP.
6. Melakukan *Post Implementation Review* terhadap *Data Center* Bank.
7. Melakukan Audit pada Divisi dan Kantor Cabang sesuai dengan hasil *Risk Assessment* dengan *risk level* prioritas utama dan risiko tinggi lebih didahulukan untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu :

Audit Umum Bidang Perkreditan, Operasional & IT

No.	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Umum Cabang Syariah Tanjung Pinang	10 Januari 2016
2	Audit Umum Cabang Bagan Siapi api	23 Februari 2016
3	Audit Umum Cabang Tembilahan	23 Februari 2016
4	Audit Umum Cabang Ranai	24 Februari 2016
5	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru	23 Februari 2016
6	Audit Umum Cabang Pangkalan Kerinci	12 Mei 2016
7	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian	11 Mei 2016
8	Audit Umum Cabang Bangkinang	23 Mei 2016
9	Audit Umum Cabang Pasar Pusat	12 Mei 2016
10	Audit Umum Cabang Air Molek	07 Agustus 2016
11	Audit Umum Cabang Dumai	07 Agustus 2016
12	Audit Umum Cabang Selatpanjang	07 Agustus 2016
13	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang	14 Agustus 2016
14	Audit Umum Cabang Tanjung Balai Karimun	21 Agustus 2016
15	Audit Umum Cabang Bengkalis	21 Agustus 2016
16	Audit Umum Cabang Teluk Kuantan	23 November 2016

17	Audit Umum Cabang Siak Sri Indrapura	27 November 2016
18	Audit Umum Cabang Batam	27 November 2016
19	Audit Umum Cabang Utama	14 Desember 2016
20	Audit Umum Divisi Treasury & Internasional	24 Februari 2016
21	Audit Umum Divisi Syariah	04 April 2016
22	Audit Umum Divisi Umum	08 Juni 2016
23	Audit Umum Divisi Teknologi Sistem Informasi	19 Juli 2016
24	Audit Umum Divisi Keuangan & Operasional	05 Oktober 2016

Audit Khusus

No.	Auditee	Tanggal Pelaksanaan
1	Audit Khusus Capem Sorek	29 Februari 2016
2	Audit Khusus Capem Tuanku Tambusai	25 April 2016 dan 17 Mei 2016
3	Audit Khusus Capem Panam	14 September 2016
4	Audit Khusus Capem Ahmad Yani	14 September 2016
5	Audit Khusus Cabang Dumai	23 November 2016
6	Audit Khusus Cabang Pasir Pengaraian	05 Desember 2016

8. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil SKAI, maka kepada beberapa orang pegawai SKAI setiap tahunnya diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Pada tahun 2016 ini pegawai SKAI telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan audit atau organisasi yang bergerak di bidang audit dengan pemberi materi yang telah berpengalaman. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme *"Sharing Moment"* sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor SKAI.

9. Dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi seluruh auditor, telah dilaksanakan Pelatihan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA). Pegawai dan Pejabat SKAI yang telah lulus/memiliki sertifikat QIA dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Zukri, SE, QIA	Pemimpin Bagian Pengawasan
2.	Zulkifli Malik, SH, QIA	Auditor Cabang
3.	Edi Muchni, SE, QIA	Auditor Kantor Pusat

Program Pengendalian Mutu

SKAI memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari :

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.

2. *Review Intern,* dilakukan terhadap Auditor SKAI secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. Untuk tahun 2016, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, SKAI melalui Pemimpin SKAI dan atau Pemimpin Bagian Internal Control telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA). Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, SKAI juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.

Quality Assurance

No	Keterangan	Pelaksanaan *Quality Assurance*
1	Auditor Cabang Tembilahan	7 Maret 2016
2	Auditor Cabang Syariah Pekanbaru	7 Maret 2016
3	Auditor Cabang Ranai	7 Maret 2016
4	Auditor Cabang Bagan Siapi-api	7 Maret 2016
5	Auditor Cabang Pangkalan Kerinci	27 Mei 2016
6	Auditor Cabang Pasar Pusat	30 Mei 2016
7	Auditor Cabang Pasir Pengaraian	1 Juni 2016
8	Auditor Cabang Bangkinang	6 Juni 2016
9	Auditor Cabang Selatpanjang	16 Agustus 2016
10	Auditor Cabang Dumai	23 Agustus 2016
11	Auditor Cabang Air Molek	23 Agustus 2016
12	Auditor Cabang Tanjung Balai Karimun	24 Agustus 2016
13	Auditor Cabang Tanjung Pinang	24 Agustus 2016
14	Auditor Cabang Bengkalis	29 Agustus 2016
15	Auditor Cabang Batam	13 Desember 2016
16	Auditor Cabang Teluk Kuantan	13 Desember 2016
17	Auditor Cabang Siak Sri Indrapura	19 Desember 2016
18	Auditor Cabang Utama	28 Desember 2016

3. *Review Ekstern*, dilakukan terhadap Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk menilai mutu kegiatan SKAI Bank Riau Kepri atas pelaksanan audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999, maka fungsi SKAI harus di-*review* oleh pihak ekstern minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Sampai saat ini, SKAI telah 5 (lima) kali di-*review* oleh pihak ekstern dengan urutan sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun	Untuk Periode
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2016	2014 – 2016
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2013	2011 – 2013
KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan	2010	2007 – 2010
KAP Drs. J. Tanzil & Rekan	2007	2004 – 2007
BPKP Riau	2004	2001 – 2004

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun 2016, Dewan Komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS untuk menunjuk Auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2016.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui surat Komite Audit No. /KA-BRK/XI/2016 tanggal 01 November 2016, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Selain penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) di atas, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan untuk melaksanakan Audit Kepatuhan & Teknologi Sistem Informasi Bank Riau Kepri tahun 2016.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan merupakan akuntan publik yang terdaftar, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) YANG MEMERIKSA BANK RIAU KEPRI TAHUN BUKU 2016			
NAMA KAP	**PIMPINAN REKAN**	**IZIN USAHA**	**ALAMAT**
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Sriyadi, MM, CPA, BKP	Menteri Keuangan KEP. 140/KM.1/2012	Rukan Tanjung Mas Raya Blok B1 No. 22 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bahwa KAP merupakan entitas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM-LK, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Bank Riau Kepri, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank, tidak memberikan jasa lain kepada Bank Riau Kepri pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan, dan tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Bank Riau Kepri lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut, serta mampu melaksanakan audit sesuai Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi dan SPKN (Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara).

Hasil audit Laporan Keuangan Bank Riau Kepri tahun 2016 yang telah disampaikan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sriyadi Elly Sugeng & Rekan tanggal 20 Februari 2017 mendapat opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**".

Berikut disampaikan beberapa Kantor Akuntan Publik yang telah memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut :

Nama Akuntan Publik	Tahun Buku	Penilaian
Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
Eka Masni, Bustaman & rekan	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
Tjahjo, Machdjud Modopuro & rekan	2014	Wajar Tanpa Pengecualian
Abdi Ichjar, BAP & rekan	2013	Wajar Tanpa Pengecualian
Eka Masni, Bustaman & rekan	2012	Wajar Tanpa Syarat

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank Riau Kepri di dalam melakukan pengelolaan risikonya menerapkan 8 (delapan) jenis risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik.

Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel* I dan Basel II serta ketentuan Bank Indonesia. Sampai saat ini, Bank Riau Kepri senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan yang terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, baik dari Bank Indonesia maupun dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Organisasi Manajemen Risiko

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank Riau Kepri dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko

Bank senantiasa meningkatkan *Risk Awareness* dalam penerapan budaya sadar risiko yang terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan.

Risiko adalah bagian dari bisnis Bank Riau Kepri. Bank mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan mengelola setiap jenis risiko, yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Bank telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank senantiasa melakukan penyempurnaan diberbagai bidang, antara lain peningkatan *risk awareness* dan penyempurnaan metodologi serta infrastruktur manajemen risiko. Bank memandang kedua hal tersebut merupakan hal

penting dalam menerapkan manajemen risiko yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko, antara lain sebagai berikut :

1. Monitoring Risiko Kredit, Pasar & Operasional dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Laporan KPMM Risiko Kredit & Pasar dan Laporan KPMM Risiko Kredit, Operasional & Pasar.
2. Melakukan perhitungan likuiditas secara harian untuk menghitung rasio likuiditas sesuai dengan standar Tingkat Kesehatan Bank, dan melakukan evaluasi profil Risiko Likuiditas Bank.
3. Melakukan pemantauan harian dan bulanan terhadap risiko pasar (nilai tukar).
4. Melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit yang telah diberikan untuk menghitung risiko likuiditas yang terkait dengan rasio kecukupan modal dan risiko kredit.
5. Melakukan kajian risiko terhadap limit *credit line* dengan Bank *Counterparty* dalam kerjasama *Money Market*, *Foreign Exchange* dan *Commercial Line.*
6. Menerbitkan beberapa kebijakan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, yaitu sebagai berikut :
    a. Surat Keputusan Direksi No. 17/KEPDIR/2016 tentang Pedoman Penerbitan Produk atau Aktivitas Bank PT. Bank Riau Kepri.
    b. Surat Keputusan Direksi No. 36/KEPDIR/2016 tentang Perubahan Pertama Atas SK Direksi No. 048A/KEPDIR/2016 tentang Buku Petunjuk Penilaian Risiko Operasional PT. Bank Riau Kepri.
    c. Surat Keputusan Direksi No. 87/KEPDIR/2016 tentang *Risk Appetite Statement* Bank Riau Kepri tahun 2017.
7. Membuat *Risk Appetite Statement* tahun 2017 sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Direksi No. 87/KEPDIR/2016 tentang *Risk Appetite Statement* Bank Riau Kepri tahun 2017.
8. Melaksanakan sosialisasi Pedoman Strategi Anti Fraud, Buku Budaya Peduli Risiko, Implementasi Penilaian Risiko Operasional, *Assessment* Risiko Operasional dan Penerapan *Bussiness Continuity Plan* (BCP) pada Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai.

Laporan Profil Risiko

Trend Laporan Profil Risiko Bank Riau Kepri sepanjang tahun 2016 relatif stabil dengan peringkat Risiko Inheren *Low to Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Satisfactory,* sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah **Peringkat 2 *Low to Moderate***.

PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO			
Jenis Risiko	**Perangkat Risiko Inheren**	**Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**	**Peringkat Tingkat Risiko**
Risiko Kredit	Low to Moderate	Fair	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Moderate	Fair	3
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Stratejik	Moderate	Fair	3
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit			**2**

Peringkat komposit Profil Risiko merupakan kesimpulan akhir tingkat risiko Bank setelah memperhitungkan Risiko Inheren dan dengan mempertimbangkan mitigasi yang dilalukan melalui Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dilakukan atas 8 (delapan) jenis risiko dan penetapan Peringkat Komposit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas masing-masing risiko.

Peringkat Komposit Profil Risiko Bank Riau Kepri adalah **2 (*Low to Moderate*)**. Risiko-risiko yang perlu menjadi perhatian utama bank adalah Risiko **Operasional** dan Risiko **Strategik** yang berada pada tingkat risiko ***Moderate*** dan kualitas penerapan manajemen risiko ***Fair,*** namun risiko lainnya tidak dapat diabaikan karena tingkat risiko berada pada level Moderate dengan kualitas penerapan manajemen risiko Fair.

Untuk **Risiko Operasional**, kejadian *fraud* dan masih cukup tingginya transaksi *human error* menjadi gambaran umum dalam penilaian. Upaya berupa sosialisasi, peningkatan kompetensi maupun penyempurnaan pedoman kerja senantiasa dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran, integritas maupun kualifikasi SDM bank. Penyelesaian *fraud* selain kewajiban ganti rugi dan sanksi pemberhentian, upaya hukum juga telah ditempuh.

Risiko Stratejik diperlukan penetapan sasaran yang sesuai dengan kemampuan organisasi, perumusan strategi yang lebih *applicable* serta perlu dilakukan pemantauan secara ketat terhadap implementasi strategi dan pencapaian sasaran-sasaran usaha yang telah ditetapkan. Kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan pengendalian intern risiko stratejik.

Risiko lainnya yang masih perlu menjadi perhatian adalah Risiko Likuiditas tercermin dari terus meningkatnya rasio LDR sehingga melebihi ketentuan yang telah ditetapkan sebesar 92% dan kemampuan Bank memenuhi kewajiban jangka pendek serta komitmen pemenuhan GWM.

Untuk risiko kredit terkait kualitas penerapan manajemen risiko adalah peningkatan pengendalian intern melalui pengawasan oleh atasan langsung dibutuhkan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam proses pemberian kredit.

Beberapa risiko yang menjadi perhatian utama Bank Riau Kepri, adalah sebagai berikut :

Jenis Risiko	Faktor Penyebab
Risiko Operasional	a. Bank memiliki karakteristik usaha yang cukup kompleks, dilihat dari produk dan jasa bank yang cukup bervariasi serta struktur organisasi bank cukup kompleks yang terdiri dari 16 Divisi dengan 147 kantor yang tersebar di seluruh Dati I/II Provinsi Riau dan Kepri, namun dalam pengelolaan telah dilengkapi dengan ketentuan, struktur dan perangkat organisasi serta pengendalian dan monitoring yang memadai. b. Seiring dengan semakin berkembangnya struktur organisasi dan skala usaha Bank, masih terdapat kelemahan terkait dengan jumlah dan kualitas SDM yang tersedia serta alur proses pelaksanaan tugas yang jelas. c. Bank mengembangkan cukup banyak produk dan aktivitas baru. Selain itu, bank melakukan outsourcing aktivitas yang kritikal yaitu TI (*core banking*). d. Bank memiliki sistem TI yang kompleks dengan banyaknya sistem pendukung yang terkoneksi dengan *core banking*. e. Terjadi potensi *fraud* eksternal mengingat masih terdapat kelemahan sistem seperti yang terjadi pada perbankan lainnya.
Risiko Stratejik	a. Kesesuaian Strategi Bank dengan kondisi lingkungan bisnis cukup memadai namun masih ada diantaranya perlu direview terutama metode dalam menentukan target dari rasio keuangan maupun proyeksi terhadap pos keuangan dalam Kebijakan Umum Direksi dan RBB. b. Pangsa pasar aset Bank Riau Kepri dibandingkan rata-rata seluruh BPD mencapai 10,16% di atas rata-rata BPD, sedangkan untuk rata-rata laba, kredit dan DPK sebesar 2,8% di bawah rata-rata BPD. c. Perubahan kondisi ekonomi makro mulai berdampak cukup signifikan terhadap kondisi bank dengan adanya PMK No. 235 dan pengurangan dana DBH, mengingat sebagian besar debiturnya adalah PNS sedangkan di sisi sumber dana sebagian besar berasal dari dana milik Pemda. d. Terget penyaluran kredit hanya tercapai sebesar 91,70%, target laba sebesar 96,57% dan target DPK sebesar 67,02% dari RBB yang ditetapkan pada tahun 2016. e. Realisasi pembukaan jaringan baru berupa ATM/ Kantor Cabang

	Pembantu/ Kedai hanya tercapai sebesar 10,5% pada periode Desember 2016 dari target yang telah ditetapkan pada RBB 2016. f. Untuk periode sampai dengan Desember 2016 sesuai dengan RBB realisasi untuk penerbitan produk/ aktivitas baru hanya tercapai sebesar 33,3%.

Pengelolaan Risiko

Upaya-upaya Bank untuk mengelola risiko yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perhitungan likuiditas secara harian untuk menghitung rasio likuiditas dan menyampaikan kepada Direksi, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk mencari sumber dana jangka panjang untuk meningkatkan likuiditas Bank dan dalam upaya mengubah komposisi DPK.
2. Monitoring dan identifikasi risiko terhadap portofolio Kredit yang diberikan setiap bulannya, dan memberikan laporan secara rutin kepada Direksi.
3. Melakukan rapat RMCO dengan Direksi dan Divisi terkait untuk membahas permasalahan yang terjadi pada risiko kredit, risiko likuiditas seperti peningkatan NPL, masalah kecukupan modal, peningkatan rasio LDR dan *fraud,* serta memberikan rekomendasi dan masukan dalam penyelesaian masalah dan mitigasi risiko yang akan muncul.
4. Melakukan kajian terhadap fasilitas *credit line Bank Counterparty* yang diajukan Divisi Treasury & Internasional dan melaporkan hasil kajian kepada Direksi, serta melakukan pemantauan sesuai dengan maksimum fasilitas yang diberikan dan BMPK Bank Riau Kepri dalam hal jangka waktu dan suku bunga dalam mitigasi risiko pasar.
5. Melakukan kajian risiko terhadap :
   - Kenaikan limit otorisasi non tunai pada sistem Bank Vision.
   - Penambahan kas limit Capem dan Kedai PT Bank Riau Kepri.
   - Rencana alih daya tahun 2016 dan 2017 PT Bank Riau Kepri.
   - Kebijakan layanan *Cash Management System* Bank Riau Kepri.
   - Pembayaran bunga berjalan deposito Rupiah.
   - Kebijakan Direksi tentang penetapan tingkat suku bunga dan metode perhitungan bunga KPR.
   - Kebijakan Direksi tentang Tabungan Sinar dan Tabungan Simpeda.
   - Kebijakan Direksi tentang pedoman pemberian kredit agribisnis *Replanting* Kelapa Sawit BPDPKS.
   - Pemberian special nisbah deposito iB mudharabah.
   - Kebijakan Direksi terkait kantor kas syariah.
   - *Colocation server non core* ke data center XL.

- Pemberian *cash back* bagi penempatan dana KUD di wilayah kerja cabang Air Molek.
- Kajian risiko sertifikat investasi mudharabah antar bank (SIMA).
- Kebijakan Direksi tentang wewenang memutus pemberian kredit dan bank garansi.
- *Hotline* Bank Riau Kepri.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya, antara lain melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2016, pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

PELAKSANAAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	
DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
1. Melakukan kajian terkait dengan kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan termuat di dalam BPP Manajemen Risiko. 2. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko Bank dan laporan tingkat kesehatan Bank. 3. Menyusun kebijakan terkait wewenang limit transaksi, wewenang limit kas, dll. 4. Mengevaluasi buku petunjuk penilaian risiko operasional. 5. Mengevaluasi pedoman penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas. 6. Mensosialisasikan kebijakan Strategi Anti *Fraud*, Budaya Peduli Risiko, Implementasi Penilaian Risiko Operasional, *Assessment* Risiko Operasional dan Penerapan *Bussiness Continuity Plan* (BCP)	1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). 2. Mengawasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup mampu secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank. Sistem pengendalian intern yang memadai telah diterapkan secara menyeluruh. Kedepan kebijakan dan prosedur yang digunakan tersebut akan terus dilakukan review dan pengujian terhadap kebijakan dan produk Bank sesuai dengan kompleksitas, dan ketentuan yang berlaku.

Untuk tahun 2016 kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang dilakukan adalah dengan menerbitkan *Risk Appetite Statement* tahun 2017 sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Direksi No. 87/KEPDIR/2016 tentang *Risk Appetite Statement* Bank Riau Kepri tahun 2017.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Satuan kerja manajemen risiko melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian dan review terhadap setiap produk Bank guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

Pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan dalam bentuk *risk self assesment* disetiap kantor Cabang yang selanjutnya disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko secara *online*, sebagai bahan monitoring seluruh Cabang dan evaluasi manajemen dalam penetapan kebijakan manajemen risiko.

Hasil monitoring *risk self assesment* dianalisis dan dibuat laporan oleh Divisi Manajemen Risiko secara triwulanan dan menyampaikan laporan tersebut ke Unit kerja terkait, Direksi dan Komisaris termasuk kepada pihak eksternal terkait lainnya.

Bank telah memiliki proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dihadapi.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank sangat berhati-hati dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait, sehingga porsi kredit kepada pihak terkait dalam total kredit yang diberikan Bank relatif sedikit.

Prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dilakukan Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006.

Secara umum Bank telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait yang disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rentang waktu selama tahun 2016, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Untuk pelaksanaan kewajiban laporan, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal BMPK dimaksud di atas secara konsekwen dan tepat waktu. BMPK Bank Riau Kepri periode Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT		
KONVENSIONAL	**SYARIAH**	**KETERANGAN**
Nominal (dalam jutaan Rp)	Nominal (dalam jutaan Rp)	
436.118 (1 Peminjam) 545.148 (1 Kelompok Peminjam)	---	Untuk perhitungan BMPK Syariah masih masuk di dalam perhitungan BMPK Konvensional

Tabel di bawah ini menjelaskan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Riau Kepri periode Desember 2016 :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	5	Rp2,574,-
2	Kepada debitur inti : a. individu b. group	25 23 2	Rp204,252,- Rp196,276,- Rp7,976,-

RENCANA STRATEGIS BANK

Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank

Langkah-langkah Strategis (*Inisiatif Strategic)* yang menjadi fokus Bank tahun 2016 antara lain adalah :

1. Penyaluran Kredit
   - Penguatan tenaga petugas kredit (AO)
   - Penyempurnaan proses kredit
2. Dana Pihak Ketiga
   - Penguatan tenaga *sales* (FO)
   - Pembentukan unit *Priority Banking*
   - Pelayanan Prima
3. Sumber Daya Manusia
   - SOT dan Kompetensi
   - Budaya kerja produktif

4. *Internal Control*

   - Penyempurnaan *Internal Control System*
   - Penerapan *Credit Risk Management*
   - Memperkuat GRC (*Governance Risk Compliance)*

5. Operasional

   - IT *Security System*
   - Otomasi Operasional

Rencana Jangka Pendek

Beberapa target jangka pendek yang akan dilakukan oleh Bank antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan tingkat NPL atau kredit bermasalah.

   Strategi yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja NPL antara lain :

   a. Intensif penagihan melalui pembentukan tim khusus penanganan kredit bermasalah.
   b. Restrukturisasi kredit.
   c. Lelang agunan.
   d. Pengendalian kredit melalui pembatasan penyaluran pada sektor-sektor usaha risiko tinggi.

   Dengan upaya-upaya yang dilakukan di atas, maka Bank menargetkan pada tahun 2016 NPL bruto sebesar 3,09% dengan asumsi :

   a. Penyaluran kredit sebesar Rp17,24 triliun.
   b. Kualitas penyaluran terjaga dengan baik dan terus ditingkatkan.

2. Peningkatan fungsi intermediasi.

   Target pertumbuhan kredit pada tahun 2016 sebesar 14% dan target pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 13%. LDR pada tahun 2016 diperkirakan berada pada rasio 88,33%.

3. Peningkatan Efisiensi.

   Dengan semakin besarnya usaha Bank maka akan berdampak pada semakin besarnya biaya operasional yang dikeluarkan. Kebijakan pertumbuhan biaya disesuaikan dengan peningkatan pendapatan. Diharapkan BOPO masih berada pada rentang normatif dengan rasio 75%.

Rencana Jangka Menengah

1. Pengembangan produk dana dan jasa.

   Untuk meningkatkan kemampuan DPK, Bank akan melakukan pengembangan berbagai produk dana dan jasa antara lain mencakup *Cash Management System (*CMS), rekening

koran melalui *e-mail (e-statement),* Laku Pandai, *virtual account* non tunai, BPD *Net Online,* registrasi *Mbanking* di EDC, Aplikasi *Edusaving* (Sinar Pendidikan), *Payment Point Online* Bank (PPOB), Pembayaran *Online* (Samsat, SP2D, PHRI, PBB), *Audit security/penetration test mobile banking* dan pengembangan serta penambahan *biller* pada *Teller,* ATM, EDC, *Mbanking* dan CMS).

2. Meningkatkan pertumbuhan kredit

   Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, Bank melakukan strategi dengan penguatan struktur organisasi yang lebih fokus pada penyaluran kredit produktif, komposisi tenaga sales dan non sales yang seimbang, pengembangan produk kredit konsumer dan mikro, penguatan fungsi kredit komersial dan korporasi (kredit sindikasi).

3. Pengembangan Usaha Syariah

   Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah dalam jangka menengah adalah :

   a. Meningkatkan jumlah asset menjadi Rp2,16 triliun.

   b. Melakukan penambahan maupun status jaringan kantor cabang dan cabang pembantu serta unit layanan syariah di berbagai daerah di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri sehingga mencapai 3-4 unit kantor cabang, 10-15 unit kantor cabang pembantu dan kedai, 2-3 kantor kas serta 55 unit layanan syariah.

   c. Implementasi kajian *spin-off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) diperkirakan pada tahun 2017-2018.

4. Optimalisasi Fungsi SBU

   Optimalisasi Fungsi SBU dilakukan dengan cara peningkatan fungsi pembinaan oleh SBU terhadap unit dan personal di bawah koordinasi SBU serta pengembangan produk/fitur layanan masing-masing SBU.

5. Optimalisasi Sarana Pendukung

   Optimalisasi sarana pendukung antara lain dilakukan pembangunan gedung kantor yang representatif, melakukan standarisasi *facade* gedung jaringan kantor dan pembaharuan sarana kerja.

6. Perluasan Jaringan Distribusi

   Perluasan Jaringan Distribusi antara lain dilakukan penambahan jaringan kantor, ATM, CDM, EDC, serta perluasan jaringan kantor ke luar wilayah Provinsi Riau dan Kepri.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan

   Peningkatan Kualitas Pelayanan antara lain dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga *frontliner,* optimalisasi sistem pelayanan pengaduan nasabah dan penerapan aplikasi penilaian kualitas pelayanan.

8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

a. Melakukan pengelolaan GCG meliputi verifikasi dan evaluasi peraturan/kebijakan internal, koordinasi dengan unit-unit terkait untuk keperluan pelaksanaan GCG.

b. Membudayakan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yaitu: *Transparency, Accountable, Responsible*, *Independence* dan *Fairness* sertam enjadikan Pegawai Bank bekerja berdasarkan Kode Etik GCG.

9. Penguatan Internal Kontrol

   Penguatan Internal Kontrol antara lain dilakukan melalui penambahan tenaga auditor cabang yang dikaitkan dengan jumlah jaringan kantor, penyempurnaan sistem *Risk Based Audit*, penerapan *Audit Rating System*, Sistem Monitoring Audit dan penyempurnaan *tool risk assesment* tingkat risiko divisi dan cabang.

10. Penguatan Manajemen Risiko

    Penguatan Manajemen Risiko antara lain dilakukan penerapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, penyempurnaan strategi anti *fraud*, pengembangan aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Aplikasi *Assesment* Risiko Operasional.

11. Menurunkan NPL

    Untuk menurunkan NPL antara lain dilakukan melalui perbaikan proses kerja, peningkatan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, perbaikan mekanisme penagihan kredit, kerja sama dengan Balai Lelang dan KPKNL untuk penyelesaian/pelelangan agunan.

12. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

    Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi antara lain dilakukan melalui IT *Security System,* pembangunan infrastruktur Data *Centre* di gedung kantor pusat, *upgrade* infrastruktur ATM *Chip,* pengembangan aplikasi (CR), bisnis intelijen, pengadaan *Server* AS/400 *Power* 8, *hardware* dan *software network, flex server,* perangkat *Firewall (security) network, backup switching* untuk *disaster recovery, licensy windows microsoft,* peralatan *pinpad* untuk *dual control* transaksi teller, peremajaan perangkat *networking,* data *warehouse, co location rack networking backhaul* dan *server delivery chanel,* implementasi *domain control (active directory), penetration test security, assesment* dan *review* tata kelola IT dan pengukuran *maturity level* dan penyusunan rencana strategis IT 2017-2021.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Bank Riau Kepri telah mentransparansikan informasi produk dan layanan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Penerapan mengenai transparansi informasi produk Bank saat ini telah dapat diketahui nasabah melalui berbagai media komunikasi antara lain seperti :

1. Website Bank Riau Kepri (www.bankriaukepri.co.id)
2. Brosur/leaflet dan iklan
3. Pengumuman yang dipasang/disebarkan di jaringan kantor-kantor Cabang Bank
4. Penjelasan lisan dari petugas *frontliner* Bank

Terkait kebijakan transparansi, Bank saat ini telah memiliki Ketentuan Direksi tentang Transparansi Produk Bank, sebagaimana tertuang di dalam SK Direksi No. 13/KEPDIR/2006 tanggal 01 Februari 2006 tentang Kebijakan Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Bank Riau.

Untuk kebijakan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan melekat di masing-masing kewajiban pelaporan Bank, seperti laporan LBU, LHBU, Laporan tahunan dll.

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para *Stakeholders* termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia/OJK dan para *Stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, dan lengkap sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

Salah satu bentuk pengungkapan transparansi kondisi keuangan Bank antara lain sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada lembaga keuangan bukan Bank, Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
3. Bank telah menyampaikan Laporan GCG tahun 2015 kepada Bank Indonesia, pihak independen sesuai ketentuan Bank Indonesia dan disajikan pada *Home Page* Bank Riau Kepri.

KEPEMILIKAN SAHAM DAN *SHARES OPTION*

Bank Riau Kepri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang perbankan dengan kepemilikan saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah kota dan kabupaten yang berada di wilayah Riau dan Kepri.

Untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki saham pada Bank Riau Kepri, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan

Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar daerah Propinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Selama dan dalam periode pelaporan tahun 2016 Bank Riau Kepri tidak memiliki opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Sepanjang tahun 2016 terdapat 1 (satu) penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Riau Kepri dengan indikasi kerugian lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Internal *Fraud* dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
Total *Fraud*	-	-	3	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

PERMASALAHAN HUKUM

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum, selama periode tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah		
	PHI	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/Upaya Perdamaian)	-	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	17	8
Total	-	18	8

Dari total 26 (dua puluh enam) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, 17 (tujuh belas) diantaranya masih dalam proses penyelesaian dan 1 (satu) permasalahan hukum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang terdiri dari 18 (delapan belas) pemasalahan hukum Perdata dan 8 (delapan) permasalahan hukum Pidana. Dari beberapa permasalahan hukum tersebut, beberapa diantaranya telah mendapat putusan Pengadilan Negeri setempat, namun Penggugat ataupun Tergugat dalam permasalahan hukum tersebut mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini (per Desember 2016) proses banding masih berjalan dan belum mendapat kekuatan hukum yang tetap.

BUY BACK SHARES DAN *BUY BACK* OBLIGASI BANK

Pada tahun 2011 Bank menerbitkan Obligasi I dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi.

Sampai saat ini Bank belum pernah melakukan *buy back shares dan buy back* atas obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

UNIT USAHA SYARIAH (UUS)

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri berkomitmen dalam melaksanakan GCG di seluruh aspek yang dimiliki dengan berlandaskan pada 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance.* Dalam pelaksanaan GCG, perlu dilakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Laporan Pelaksanaan GCG ini disusun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai ketentuan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, bahwasanya jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan DPS dipimpin oleh 1 (satu) orang yang ditunjuk dari anggota DPS. DPS PT. Bank Riau Kepri terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Dr. H. Suryan Al Jamrah,MA (ketua) dan Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA (anggota). Kedua anggota DPS tersebut diangkat pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.15/5/DPbS/PAdBS/Pbr

dan Surat Rekomendasi DSN-MUI No.U-400/DSN-MUI/XI/2011. Berikut susunan DPS Bank Riau Kepri :

No	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Surat Rekomendasi DSN-MUI	Surat Keputusan Bank Indonesia	Masa Jabatan
1.	Dr. H. Suryan Al Jamrah,MA	Ketua	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/PAd BS/Pbr	4 (empat) tahun terhitung tanggal 13 Februari 2013 s.d. 13 Februari 2017
2.	Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA	Anggota	SK Direksi PT. Bank Riau Kepri No.23/KEPDIR/2013	Surat No. U-400/DSN-MUI/XI/2011	Surat No. 15/5/DPbS/PAd BS/Pbr	

Adapun masa Jabatan DPS selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal 13 Februari 2013 s.d. 13 Februari 2017 sebagaimana tertuang dalam akta RUPSLB Nomor 19 yang dibuat di hadapan notaris Refizal,SH.,MHum dan Surat Keputusan Direksi Bank Riau Kepri No. 23/KEPDIR/2013 tanggal 26 Februari 2013.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut :

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS;
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut;
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi;
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS yang belum ada fatwanya;
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pedoman Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Direksi Bank Riau Kepri telah menerbitkan SK Direksi Nomor 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Berisi mengenai pendahuluan dan latar belakang penyusunan, dasar hukum, serta pengertian-pengertian

Bab II : Berisi uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai kedudukan DPS, persyaratan anggota DPS, tugas dan tanggung jawab DPS, mekanisme penetapan anggota DPS, jumlah dan perangkapan keanggotaan DPS, rapat DPS, masa jabatan DPS, serta hak dan fasilitas anggota DPS dan ketentuan lainnya.

Bab III : Pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, berisi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru dan terhadap kegiatan Unit Usaha Syariah serta tata cara pelaporan DPS.

Bab IV : Objek material pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa Unit Usaha Syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syariah.

Bab V : Lampiran-lampiran.

Selama tahun 2016 DPS Bank Riau Kepri telah melakukan aktivitas dan rapat yang merupakan realisasi dari tugas dan tanggung jawab DPS.

Opini dan Aktivitas Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bentuk realisasi tugas dan tanggung jawab dalam hal menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS, DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip syariah untuk laporan keuangan tahun buku 2016. Pernyataan ini dilampirkan di Laporan Aktifitas DPS yang dilaporkan per semester pada tahun 2016. DPS juga menjawab surat dari Akuntan Publik terkait kesesuaian UUS Bank Riau Kepri terhadap prinsip syariah.

Wujud realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk dan memberikan opini syariah dari pengeluaran produk tersebut adalah DPS telah ikut mengawasi selama proses pembuatan produk baru UUS dengan mengadakan rapat koordinasi antara Divisi Syariah dan Kantor Cabang Syariah.

Untuk realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya, UUS Bank Riau Kepri telah memenuhi semua permintaan data yang diminta oleh DPS, baik pada saat proses audit yang rutin ataupun permintaan yang bersifat insidentil.

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS, dimana DPS melakukan pengawasan terhadap Bank baik dalam hal dikeluarkannya produk baru maupun aktivitas baru, maka DPS dalam hal ini memberikan opini/pendapat terkait produk dan aktivitas tersebut, apakah telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Adapun pendapat tersebut disampaikan dalam bentuk opini dan surat keterangan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

1. Opini Nomor 01/DPS-BRKS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pedoman Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.
2. Opini Nomor 02/DPS-BRKS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pedoman Pembiayaan Aneka Guna (PAG) iB PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.
3. Opini Nomor 03/DPS-BRKS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pedoman Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PKB) iB PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.
4. Opini Nomor 04/DPS-BRKS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Kebijakan Penyaluran Dana Kebajikan (Al qardh al-Hasan) iB PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.

Dapat disampaikan juga DPS Bank Riau Kepri telah melaporkan laporan Semester hasil pengawasan DPS selama tahun 2016 secara tepat waktu ke Otoritas Jasa Keuangan yang juga diteruskan ke Direksi, Dewan Komisaris Bank Riau Kepri dan Dewan Syariah Nasional – MUI, hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Realisasi kegiatan yang telah disebutkan di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kegiatan DPS selama tahun 2016, yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	AKTIVITAS DPS	TEMPAT	KETERANGAN
1	4 Januari 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Tembilahan	KCPS Tembilahan	Ketua DPS dan Pinbag UUS
2	18 Januari 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCS Tg. Pinang	KCSP Tg. Pinang	Ketua DPS dan Pinbag UUS
3	19 Januari 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Panam	KCPS Panam	Anggota DPS dan Pinbag UUS
4	20 Januari 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Tg. Balai Karimun	KCPS Tg. Balai Karimun	Ketua DPS dan Pinbag UUS
5	20 Januari 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Taluk Kuantan	KCPS Taluk Kuantan	Anggota DPS dan Pinbag UUS
6	21 Januari 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Batam	KCPS Batam	Ketua DPS dan Pinbag UUS
7	22 Januari 2016	Narasumber di Kemenag RI Prov. Kepri	Kemenag RI	Anggota DPS

8	25 Januari 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Duri	KCPS Duri	Anggota DPS dan Pinbag UUS
9	28 Januari 2016	Peresmian Kantor Pusat dan Cab. Utama Bank Riau Kepri	Menara Dang Merdu PT. Bank Riau Kepri	Ketua DPS
10	21 Maret 2016	Rapat Pembahasan Self Assessment GCG Syariah	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS
11	14-17 Mei 2016	Sidang Tahunan Islamic Development Bank ke-41	Auditorium IPB Bogor dan Jakarta Convention Center, Jakarta	Anggota DPS, Direktur Kredit & syariah, Pindiv Syariah dan Pinbag Syariah
12	2 Juni 2016	Rapat dengan Divsi Syariah tentang Pandangan Syariah terhadap Menunda Pembayaran Margin Pada Angsuran Murabahah untuk disetorkan ke Pokok terlebih dulu	Ruang Rapat Divisi Syariah	Anggota DPS dan Pemimpin Bagian Peng. Bisnis dan Pemasaran Divisi Syariah
13	23 Juni 2016	Rapat membahas MMQ	Ruang Rapat Divisi Syariah	Anggota DPS dan Tim Divisi Syariah
14	10 Agustus 2016	Literasi perbankan syariah	Tg. Pinang Kepri	Anggota DPS dan Staff Div. Syariah
15	8 – 12 Agustus 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCS Tg. Pinang, KCPS Batam dan KCPS Tg. Balai Karimun	Kepri	Ketua DPS
16	11 Agustus 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Duri	KCPS Duri	Anggota DPS dan Tim Divisi Syariah
17	12 Agustus 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Panam	KCPS Panam	Anggota DPS dan Tim Divisi Syariah
18	22-23 Agustus 2016	DPS melakukan pemeriksaan terhadap KCPS Taluk Kuantan	KCPS Taluk Kuantan	Anggota DPS dan Pinbag UUS
19	9 Nov 2016	Pra Ijtima' Sanawi (pertemuan tahunan) yang diadakan DSN-MUI	Kantor DSN MUI Jakarta	Ketua DPS
20	8-9 Des 2016	Ijtima' Sanawi (pertemuan tahunan) yang diadakan DSN-MUI	Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara	Ketua DPS

Frekuensi Rapat

Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Riau Kepri telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Selama tahun 2016 DPS PT. Bank Riau Kepri telah mengikuti rapat intern UUS PT. Bank Riau Kepri dan Rapat ekstern dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebanyak 15 (lima belas) kali.

Berikut tabel frekuensi Rapat DPS selama tahun 2016 :

Nama	Tingkat Kehadiran		Total Kehadiran
	Rapat Intern dengan PT. Bank Riau Kepri (8 Rapat)	Rapat Ekstern dengan DSN-MUI (2 Rapat)	
Dr. H. Suryan Al Jamrah	9	2	11
Drs. KH. Tengku Zulkarnain,MA	3	1	4

Berikut rincian rapat yang diikuti oleh DPS selama tahun 2016 :

No	Tanggal	Aktivitas DPS	Tempat	Keterangan
1	9 Februari 2016	Membahas review produk pembiayaan syariah	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS dan Tim Divisi Syariah
2	9 Februari 2016	Membahas Opini No.01/DPS-BRKS/II/2016 tentang Pedoman Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS dan Tim Divisi Syariah
3	9 Februari 2016	Membahas Opini Nomor 02/DPS-BRKS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pedoman Pembiayaan Aneka Guna (PAG) iB PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS dan Tim Divisi Syariah
4	9 Februari 2016	Membahas Opini Nomor 03/DPS-BRKS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pedoman Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor (PKB) iB PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS dan Tim Divisi Syariah

5	9 Februari 2016	Membahas Opini Nomor 04/DPS-BRKS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Kebijakan Penyaluran Dana Kebiajikan (Al qardh al-Hasan) iB PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS dan Tim Divisi Syariah
6	16 februari 2016	Membahas hasil pengawasan rutin ke cabang/capem periode Juli-Desember 2016	Ruang Rapat Divisi Syariah	Anggota DPS, Pemimpin Divisi Syariah, dan tim Divisi Syariah
7	21 Maret 2016	Membahas Pemaparan Draft Laporan pelaksanaan dan Self assessment GCG UUS Bank Riau Kepri tahun 2016	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS dan Tim Divisi Syariah
8	14-17 Mei 2016	Rapat Sidang Tahunan Islamic Development Bank ke-41	IPB Bogor dan Jakarta Convention Center	Anggota DPS, Direktur Kredit & syariah, Pindiv Syariah dan Pinbag Syariah
9	2 Juni 2016	Rapat tentang Pandangan Syariah terhadap Menunda Pembayaran Margin Pada Angsuran Murabahah untuk disetorkan ke Pokok terlebih dulu	Ruang Rapat Divisi Syariah	Anggota DPS dan Pemimpin Bagian Peng. Bisnis dan Pemasaran Divisi Syariah
10	23 Juni 2016	Membahas tentang kerugian yang ditanggung sesuai porsi modal dalam Musyarakah mutanaqishah	Ruang Rapat Divisi Syariah	Anggota DPS, Pemimpin Divisi Syariah, dan tim Divisi Syariah
11	27 Juli 2016	Membahas pembukuan fee asuransi	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS, Pemimpin Divisi Syariah, dan tim Divisi Syariah
12	27 Juli 2016	Membahas Lanjutan tentang kerugian yang ditanggung sesuai porsi modal dalam Musyarakah mutanaqishah	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS, Pemimpin Divisi Syariah, dan tim Divisi Syariah
13	27 Juli 2016	Membahas jadwal pengawasan rutin ke cabang/capem	Ruang Rapat Divisi Syariah	Ketua DPS, Pemimpin Divisi Syariah, dan tim Divisi Syariah
14	9 Nov 2016	Ijtima' Sanawi (pertemuan tahunan) yang diadakan DSN-MUI	Kantor DSN MUI Jakarta	Ketua DPS
15	8-9 Des 2016	Rapat Ijtima' Sanawi yang diadakan DSN-MUI	Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara	Ketua DPS

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS

Remunerasi yang dimaksud adalah penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (*benefit*), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.

Fasilitas lain yang dimaksud adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Berikut tabel Remunerasi dan Fasilitas lainnya DPS Bank Riau Kepri :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun	
		Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	2	Rp399,52,-
2.	Fasilitas lainnya :	-	-
	a. Yang dapat dimiliki	-	-
	b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-
TOTAL			Rp399,52,-

Jumlah anggota DPS Bank Riau Kepri yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini :

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-
di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-
Rp. 500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Permasalahan Hukum Yang Terjadi

Yang dimaksud dengan "*internal fraud*" adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan *"mempengaruhi kondisi keuangan UUS PT. Bank Riau Kepri secara signifikan"* adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk penyimpangan (*internal fraud*) sebagaimana yang disebut diatas telah terjadi pada UUS PT. Bank Riau Kepri selama tahun 2016, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Internal *Fraud* dalam 1 tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan :					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2014	Tahun 2015
Total *Fraud*	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Yang dimaksud dengan "*permasalahan hukum*" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun 2016 dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk permasalahan hukum sebagaimana yang dimaksud tersebut, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	7	1
Total	7	1

Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang dimaksud adalah pendapatan yang didapatkan dari usaha berbasis bunga (ribawi) atau bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan bunga dari penempatan dana antar Bank pada Bank Konvensional.

Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri selama tahun 2016 tidak ada memiliki pendapatan dari pendapatan non halal sebagaimana dimaksud di atas.

Penggunaan Konsultan atau Penasehat

Pada tahun 2016 Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau Kepri menggunakan jasa Konsultan sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Konsultan/Vendor	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Keterangan
1	Wiroso	Jasa Konsultan Pendamping	Pendampingan Implementasi Akuntansi Perbankan Syariah PAPSI 2013	Telah Selesai
2	PT. Solmit Bangun Indonesia	Jasa Konsultan	Pekerjaan Implementasi Tingkat Kesehatan bank	Telah Selesai

PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya Bank Riau Kepri telah menyediakan dana untuk kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan.

Sepanjang tahun 2016 Bank telah memberikan bantuan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dengan total sebesar Rp1.625.112.200,- yang terbagi pada beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pendidikan**

   Di tahun 2016, berbagai kegiatan dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya untuk meningkatkan dunia pendidikan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Bank telah membantu dalam pemberian beasiswa kepada beberapa siswa berprestasi, pembangunan laboratorium dan kelas di beberapa sekolah serta memberikan training/pelatihan. Bank Riau Kepri percaya, bahwa pendidikan mampu mambantu meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp169.554.000,-.

2. **Kegiatan Keagamaan**

   Bank Riau Kepri percaya bahwa dengan agama, maka kita mampu menata kehidupan sosial dan kemasyarakatan agamis yang madani. Rusaknya tatanan dan nilai-nilai moral dikarenakan ketidakpedulian masyarakat kepada nilai-nilai luhur dalam agama. Untuk itu, di tahun 2016 fokus Program Bantuan Kemasyarakatan tetap pada Kegiatan Keagamaan. Bank Riau Kepri telah melaksanakan serangkaian kegiatan diantaranya : bantuan pembangunan mesjid/musholla, bantuan untuk kegiatan MTQ, bantuan sapi Qurban untuk kaum dhuafa dan pelaksanaan safari Ramadhan. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp363.140.000,-.

3. **Kegiatan Sosial Kemasyarakatan**

   Di tahun 2016, berbagai kegiatan dilaksanakan Bank Riau Kepri di bidang sosial kemsyarakatan antara lain : bantuan sembako, acara peringatan hari jadi Provinsi/Kota/Kabupaten/Kota, bantuan bencana kebakaran hutan, bantuan *speed boat* untuk bencana banjir, dan lain-lain. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp800.978.200,-.

4. **Kegiatan Kepemudaan dan Pembinaan Olahraga**

   Di tahun 2016, berbagai kegiatan dan program dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya membangun semangat kepemudaan yang terarah dan posisif, serta pembinaan keolahragaan agar jiwa-jiwa muda terpancing untuk aktif berprestasi. Sepanjang tahun 2016, Bank telah memberikan kontribusi berupa bantuan kegiatan kejurnas/pertandingan/turnamen dan bantuan berupa pembangunan sarana olahraga umum. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp22.670.000,-.

5. Kegiatan Seni dan Budaya

Di tahun 2016, berbagai kegiatan dan program dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya untuk menjaga kelestarian adat, seni, dan budaya yang ada di Riau dan Kepulauan Riau. Sepanjang tahun 2016 Bank telah melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya: partisipasi terlaksananya pagelaran seni melayu, sponsorship untuk kegiatan lomba kesenian, pembinaan seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga-lembaga kebudayaan. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp257.000.000,-.

6. Kegiatan Kesehatan

Di tahun 2016, Bank Riau Kepri tetap berkomitmen untuk turut mendukung peningkatan kesehatan masyarakat yang diwujudkan melalui kerja sama dengan beberapa institusi dan lembaga di bidang kesehatan yang menjadi mitra Bank. Serangkaian program telah dilaksanakan dalam bentuk bantuan prasarana rumah sakit, bantuan pengobatan gratis dan sunatan massal serta berbagai kegiatan kesehatan lainnya. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp11.770.000,-.

Sepanjang tahun 2016, Bank Riau Kepri juga telah menyalurkan dana kemitraan kepada beberapa pemerintah daerah di Provinsi Riau dan Kepri dalam bentuk program kemitraan berupa pengadaan *dump truck* sampah, Rumah Sederhana Layak Huni, Mobil Jenazah, Mobil Ambulance, sarana dan prasarana sekolah, dll.

Total dana kemitraan yang disalurkan sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp11.429.349.713,-.

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN GCG

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Bank diwajibkan melaksanakan *Self Assessment* terhadap penerapan GCG. Pelaporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dilakukan secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (TKB).

Untuk laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Bank dalam rangka laporan pelaksanaan GCG tahun 2016 disusun sesuai dengan format sebagaimana lampiran IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yaitu sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)*Pelaksanaan GCG		
Peringkat		Definisi Peringkat
Individual	**3**	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

Analisis

Untuk laporan GCG periode tahun 2016, Bank telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang termuat di dalam *Governance Structure, Governance Process* maupun pada *Governance Outcome.*

Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan penerapan GCG di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome.*

Governance Structure

1. Aspek positif

   a. Secara umum kelengkapan struktur Direksi Bank telah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Anggaran Dasar Bank.

   b. Bank saat ini telah melengkapi posisi Pejabat Eksekutif sesuai dengan SOT Bank terkini.

   c. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagaimana tertuang di dalam Kebijakan Perkreditan Bank dan BPP Perkreditan.

2. Aspek Negatif

   a. Saat ini Komisaris Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi satu orang Komisaris Independen dan satu orang Komisaris Non Independen. Hal ini tidak memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam :

      - Pasal 23 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
      - Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Bank.

   b. Terdapat organ Direksi Bank yang belum terpenuhi (diisi) yaitu Direktur Dana & Jasa serta Direktur Kredit & Syariah berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank terkini.

   c. Terdapat satu Komite yaitu Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Non Independen. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 42 ayat 2 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

   d. Khusus untuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selain jumlah auditor masih kurang juga terdapat kelemahan dari sisi kualitas. Hal ini terlihat dari minimnya auditor yang telah memiliki sertifikat QIA maupun gelar profesi auditor lainnya.

Governance Process

1. Aspek positif

   a. Bank selalu berupaya untuk membangun budaya kepatuhan dan budaya peduli risiko diantaranya melalui sosialisasi *Compliance Code of Conduct*, sosialisasi budaya peduli risiko dan anti *fraud*.
   b. Untuk pemberian kredit kepada pihak terkait telah dilakukan dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris serta tidak melebihi BMPK.
   c. Untuk penyediaan dana dalam jumlah besar Bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilakukan melalui mekanisme pengujian kepatuhan terhadap pemberian kredit yang merupakan kewenangan memutus Rapat Direksi.
   d. Proses pembentukan CKPN telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dengan jumlah yang lebih dari memadai.

2. Aspek Negatif

   a. Masih terdapat beberapa temuan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait melewati jangka waktu komitmen yang telah disepakati dengan pihak regulator, sehingga tindak lanjut temuan tersebut tidak sesuai dengan komitmen Bank kepada OJK/BPK.

   b. Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan fungsi audit intern, antara lain sebagai berikut :

      - Fungsi audit intern telah dilaksanakan, namun masih terdapat pengulangan temuan-temuan yang sama.
      - SKAI belum optimal dalam melakukan pemantauan hasil laporan pemeriksaan khususnya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor kantor cabang.
      - SKAI belum melakukan perencanaan dan pemeriksaan berdasarkan *Risk-Based Audit* sebagaimana yang tercantum pada BPP.
      - Ruang lingkup pemeriksaan dan rencana pemeriksaan SKAI belum memadai.
      - Peningkatan mutu dan kualitas keterampilan auditor telah dilakukan namun belum dapat memberikan hasil optimal untuk kepentingan audit seperti audit IT dan Treasury.

Governance Outcome

1. Aspek positif

   a. Pencapaian laba Bank untuk tahun 2016 sebesar ± 96 % dari target dan pertumbuhan laba sebesar ± 42 % dari tahun 2015.

   b. Bank memperoleh predikat sebagai salah satu Perusahaan Terpercaya dari lembaga *The Indonesian Institute for Corporate Governance* serta berbagai penghargaan lainnya (± 38 penghargaan).

   c. Bank telah menyampaikan laporan-laporan secara lengkap dan tepat waktu seperti laporan publikasi, laporan keuangan, laporan tingkat kesehatan Bank, laporan BMPK dan laporan-laporan lainnya kepada pihak regulator maupun pihak-pihak terkait lainnya.

2. Aspek Negatif

   a. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite hanya memuat kesimpulan akhir rapat dan belum menggambarkan situasi rapat termasuk ada/tidaknya *dissenting opinions* yang terjadi selama proses rapat.

   b. Aset Bank tidak menunjukkan pertumbuhan sesuai yang direncanakan mengingat target aset, target penyaluran kredit dan penghimpunan dana tidak tercapai.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Mambang Mit
Komisaris Utama

Irvandi Gustari
Direktur Utama